



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TULANG BAWANG**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 telah diselesaikan dengan baik. Sesuai dengan amanah dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja, penyusunan Laporan Kinerja merupakan kewajiban bagi seluruh instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Laporan Kinerja Diskominfo menjadi sebuah penetapan/Perjanjian sekaligus menjadi dasar untuk pengukurannya dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Diskominfo tahun 2025 ini tidak terlepas dari kekurangan dan kendala-kendala, namun untuk mengatasi kendala tersebut Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang tetap berupaya melalui koordinasi bersama para pelaksana kegiatan. Semoga Laporan Kinerja ini dapat menjadi koreksi dan menciptakan kinerja yang lebih baik lagi. Terima kasih disampaikan kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah memberikan masukan, saran dan pendapat dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 ini.

Menggala, Januari 2026

KEPALA DINAS,



NANAN WISNAGA, S.Sos., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19730908 200003 1 003

RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang pada Tahun Anggaran 2025 merupakan bentuk Pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang dalam merealisasikan visi dan misinya sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang. Sejak terbentuknya Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2008 tanggal 11 Agustus 2008, maka Bagian Humas dan Komunikasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang berubah menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja yang dilakukan terhadap kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang dalam merealisasikan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana strategis, dengan mempertimbangkan nilai kinerja indikator, *input*, *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact*, maka nilai capaian kinerja penyerapan anggaran tahun 2025 sebesar 88,41% dan menurut skala pengukuran ordinal, maka nilai capaian kinerja tersebut dapat dikategorikan *berhasil*.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 ini kami susun sebagai bahan Laporan Kinerja Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 sekaligus merupakan pertanggungjawaban dalam melaksanakan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang kepada Bupati Tulang Bawang serta untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.



Menggala, Januari 2026

KEPALA DINAS,

NANAN WISNAGA, S.Sos., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19730908 200003 1 003

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	5
1.5. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang	7
1.6. Penentuan Isu – isu Strategis	9
1.7. Sistematika Penulisan	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
3.1. Rencana Strategis	16
3.2. Indikator Kinerja Utama	19
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	19
3.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
3.1. Akuntabilitas Kinerja	28
3.1.1. Kerangka Pengukuran Kinerja	29
3.1.2. Pengukuran Kinerja Tahun 2025	30
3.1.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya	39
3.1.4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Akhir RPJMD	41

3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan	45
3.1.6. Kendala / Permasalahan	64
3.1.7. Strategi / Tindak Lanjut / Upaya Perbaikan	68
3.1.7. Analisis Program Kegiatan Penunjang Keberhasilan	74
3.2. Akuntabilitas Keuangan	79
3.2.1. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2025	79
3.2.2. Faktor Penghambat Realisasi Anggaran	84
BAB IV PENUTUP	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1.6 Isu Strategis Daerah	1
Tabel 2.1 Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025	1
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika	1
Tabel 2.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025	1
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2025	1
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2025	1
Tabel 3.1 Skala pengukuran Kinerja dan Peringkat Kinerja	1
Tabel 3.2 Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2025 ..	1
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Program Tahun 2025	1
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2025	1
Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023-2025	1
Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja Utama terhadap Target RPJMD	1
Tabel 3.7 Capaian Indikator Kinerja Program	1
Tabel 3.8 Predikat Penilaian Tingkat Kematangan	1
Tabel 3.9 Kriteria Tingkat Kematangan	1
Tabel 3.10 Kategori Tingkat Keamanan Informasi	1
Tabel 3.11 Program Penunjang Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025	1
Tabel 3.12 Realisasi Anggaran Tahun 2025	1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang	i
Gambar 3.1 Komponen Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1
Gambar 3.2 Evaluasi SAKIP Oleh Inspektorat	1
Gambar 3.3 Penerimaan Penghargaan Badan Publik Informatika pada KIP Lampung 2025	1
Gambar 3.4 Pemantauan SPBE Tahun 2025	1
Gambar 3.5 Penilaian Indeks SPBE Pemkab. Tulang Bawang Tahun 2025	1
Gambar 3.6 Pelaksanaan Penilaian Indeks SPBE tahun 2025	1
Gambar 3.7 Hierarki Domain, Aspek, dan Indikator Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1
Gambar 3.8 Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Penilaian EPSS	1
Gambar 3.9 Koordinasi dan Pelaksanaan Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara umum, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Secara khusus, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan media yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Media ini sangat penting untuk dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan untuk pihak-pihak terkait. LKjIP dapat digunakan sebagai alat untuk perbaikan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan manajemen di lingkungan instansi pemerintah. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mewujudkan cita-cita bangsa.

LKjIP ini disusun setiap tahun sebagai bukti pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan, program, misi dan visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang. Hal tersebut telah diatur berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Laporan Kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah kabupaten/Kota berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sehingga, LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tulang Bawang dikategorikan sebagai laporan rutin.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap keberhasilan atau kegagalan tingkatan kinerja yang dicapai. Oleh karena itu LKjIP harus disusun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan. Selain itu LKjIP juga harus memenuhi beberapa ciri laporan antara lain relevan, tepat waktu, dapat dipercaya/diandalkan, mudah dimengerti, dalam bentuk yang menarik, berdaya banding tinggi (*reliable*), berdaya uji (*verifiable*), lengkap, netral, padat dan mengikuti standar pelaporan yang ditetapkan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang tanggal 23 Desember 2024. Dengan berpedoman pada Peraturan Daerah tersebut, maka Bagian Humas dan Komunikasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang berubah menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang.

Sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah itu pula

Diskominfo mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan sesuai Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penyusunan LKjIP Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi dan secara internal dapat mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi secara baik dan akuntabel, efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat maupun lingkungan.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Tulang Bawang dan Kabupaten Dati II Tanggamus;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 15. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 48 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja, maka dokumen Laporan Kinerja ini disusun dengan maksud agar setiap unsur penyelenggaran negara mempertanggungjawabkan secara akuntabel pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam penggunaan anggaran dan kebijakan yang dimandatkan kepada instansi pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Di dalam Laporan Kinerja ini terkandung instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggaran negara dan pemerintahan.

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan informasi yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang, sehingga dapat dijadikan acuan perbaikan kinerja di masa yang akan datang

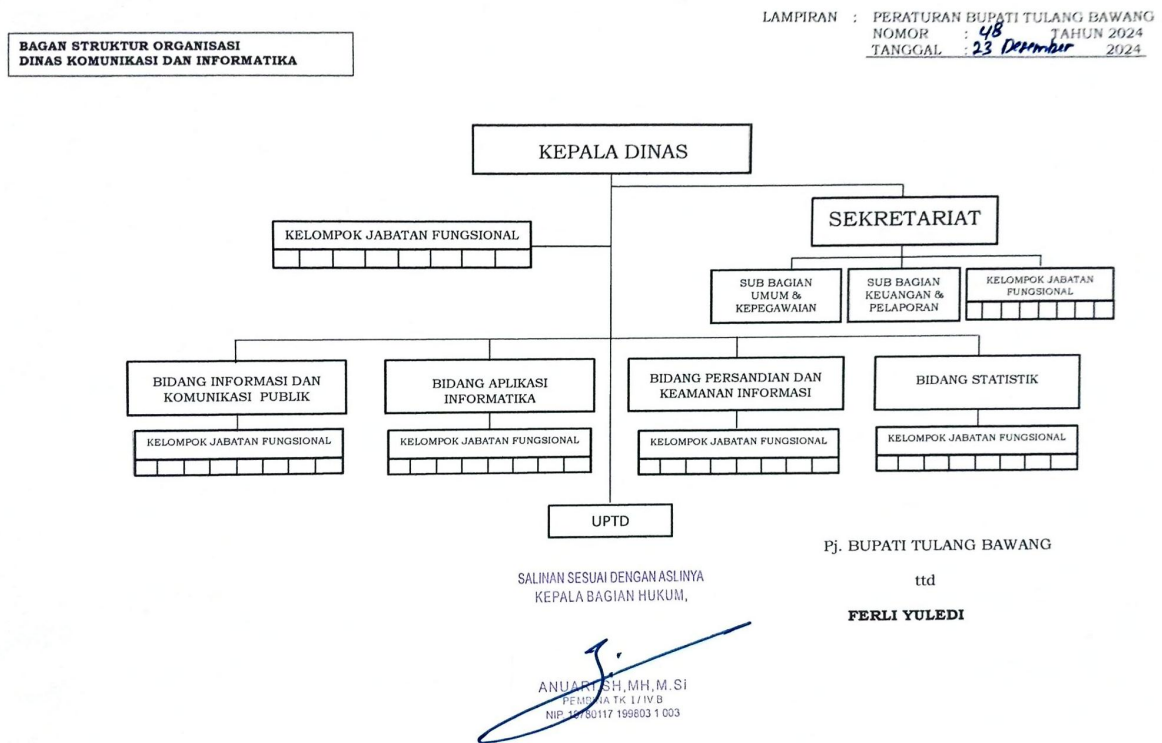
1.4. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Rincian jabatan dan tugas pokok serta fungsi dinas berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 48 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang adalah sebagai berikut :

1. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik, dan bidang persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah;
2. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
 - b. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
 - d. Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Adapun Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Aplikasi Informatika, terdiri atas Kelompok Jabatan

Fungsional;

- e. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Statistik, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional



Sumber : Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 48 Tahun 2024.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang

1.5. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan antara lain sebagai berikut:

1. Urusan Komunikasi dan Informatika:

- Belum Optimalnya Tata Kelola e-Government, Masih adanya aplikasi yang tidak terintegrasi antar Organisasi

Perangkat Daerah (OPD).

- Infrastruktur TIK Belum Merata, Belum meratanya jangkauan internet di area *blank spot* serta keterbatasan perangkat keras/lunak di tingkat kecamatan/desa.
- Rendahnya Literasi Digital Masyarakat, Kurangnya pemahaman masyarakat dalam menggunakan internet sehat, menyebabkan tingginya penyebaran hoaks dan konten negatif.
- Belum Maksimalnya Diseminasi Informasi, Rendahnya efektivitas diseminasi informasi kebijakan dan hasil pembangunan daerah ke masyarakat luas.
- Keterbatasan SDM Teknisi (IT), Kurangnya tenaga ahli seperti programmer, *network engineer*, dan *data analyst*.
- Anggaran Terbatas, Belum mencukupinya anggaran untuk pengembangan infrastruktur TIK yang cepat berubah.

2. Urusan Statistik:

- Data Sektoral Belum Terintegrasi, Belum terwujudnya Satu Data Indonesia (SDI) secara utuh, di mana data dari OPD masih terkotak-kotak.
- Kualitas dan Akurasi Data Rendah, Kurangnya updating data statistik sektoral secara berkala, sehingga data yang digunakan untuk perencanaan pembangunan kurang akurat.
- SDM Pengelola Data Terbatas, Kurangnya aparatur yang memiliki keahlian khusus dalam statistik sektoral.

3. Urusan Persandian:

- Kurangnya Kesadaran Keamanan Informasi, Rendahnya kesadaran ASN dan masyarakat mengenai keamanan data dan informasi (*Cyber Security*).
- Rentan Serangan Siber, Belum optimalnya pengamanan aset informasi pemerintah, terutama website dan aplikasi milik pemerintah.
- Keterbatasan Sumber Daya Persandian, Kurangnya SDM

fungsional sandiman dan perangkat operasional persandian di daerah.

1.6. Penentuan Isu – isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi yang memiliki potensi untuk menjadi masalah atau sebagai peluang di masa depan. Isu juga berpotensi menjadi tantangan di kemudian hari. Selain dari permasalahan, isu strategis juga dapat merujuk pada potensi daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, namun jika potensi tersebut dikelola dengan baik maka dapat menjadi modal pembangunan daerah di masa depan.

Mengingat banyaknya dan kompleksitas permasalahan pembangunan yang sudah ada, untuk menentukan isu strategis diperlukan identifikasi mulai dari isu global/internasional, nasional, regional, dan lokal sesuai dengan dinamika yang berkembang saat ini dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang. Untuk itu, Dinas komunikasi dan Informatika mengidentifikasi isu strategis kedalam tabel berikut ini.

Tabel 1.1 Isu Strategis Daerah

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bonus demografi dengan dominasi penduduk usia produktif yang dapat menjadi motor pembangunan;	- Kualitas tenaga kerja belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja (mismatch supply-demand) - Pemanfaatan teknologi digital dalam pendidikan, pelatihan, dan pelayanan public masih terbatas.	- Belum optimalnya kolaborasi lintas sector dan pemangku - kepentingan dalam tata kelola pembangunan berkelanjutan dan penguatan kapasitas kelembagaan lingkungan.	- Demografi global; - Perkembangan teknologi.	- Masih Rendahnya Produktivitas ; - Rendahnya kualitas sumber daya manusia; - Tata Kelola dan akuntabilitas pemerintah	- Belum optimalnya pengembangan kawasan ekonomi baru berbasis eco-city yang terintegrasi dan berkelanjutan; - Peran Iptek dan Inovasi untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
- Keberadaan industri- industri yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru; - Potensi jaringan transportasi	Akses listrik, energi terbarukan, dan jaringan telekomunikasi belum sepenuhnya menjangkau wilayah	Belum optimalnya kolaborasi lintas sector dan pemangku kepentingan dalam tata kelola	- Persaingan sumber daya alam; - Geopolitik dan geoekonomi; - Perkembangan teknologi.	- Tata Kelola dan akuntabilitas pemerintah; - Masih Rendahnya Produktivitas	Belum optimalnya pemanfaatan ruang fiskal dalam mendukung pembangunan yang berkualitas dan	Peningkatan pelayanan infrastruktur wilayah

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
darat, sungai, dan laut sebagai penghubung distribusi barang dan jasa; Dukungan program nasional dan provinsi dalam pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, energi, dan telekomunikasi.	terpencil; Masih rendahnya pemeliharaan infrastruktur yang sudah terbangun	pembangunan berkelanjutan dan penguatan kapasitas kelembagaan lingkungan		.	berkelanjutan; - Belum optimalnya ketahanan dan kemandirian energi untuk mendukung keberlanjutan pembangunan daerah; - Belum optimalnya pengembangan kawasan ekonomi baru berbasis eco-city yang terintegrasi dan berkelanjutan; - Integritas dan Efektivitas Birokrasi yang belum optimal	
Dukungan regulasi nasional terkait reformasi birokrasi, digitalisasi pemerintahan,	Kinerja birokrasi masih belum optimal, ditandai dengan rendahnya efektivitas,	Rendahnya integrasi aspek lingkungan dalam perencanaan	- Geopolitik dan geoekonomi; - Perkembangan teknologi; - Tata kelola	- Tata Kelola dan akuntabilitas pemerintah; - Masih	Belum optimalnya pemanfaatan ruang fiskal dalam mendukung pembangunan	Optimalisasi tata Kelola pemerintahan dan keuangan daerah

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
dan penguatan keuangan daerah • Ketersediaan SDM aparatur yang dapat ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan dan pendidikan; • Dukungan teknologi digital untuk egovernment, ebudgeting, dan system informasi public;	efisiensi, dan integritas aparatur; • Kualitas pelayanan publik belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan masyarakat; • Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah masih perlu diperkuat; • Pemanfaatan teknologi informasi dalam tata Kelola pemerintahan masih terbatas; • Masih lemahnya koordinasi lintas	n pembangunan sektoral, termasuk dalam pengelolaan Kawasan strategis dan pertumbuhan wilayah; • Belum optimalnya kolaborasi lintas sector dan pemangku kepentingan dalam tata kelola pembangunan berkelanjutan dan penguatan kapasitas kelembagaan lingkungan.	keuangan global; • Urbanisasi dunia	Rendahnya Produktivitas ; • Krisis lingkungan;	yang berkualitas dan berkelanjutan; • Integritas dan Efektivitas Birokrasi yang belum optimal; • Belum optimalnya pemenuhan hak dan perlindungan bagi anak, perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok terlanjar;	

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	sektor dan kolaborasi dengan pihak swasta maupun masyarakat.					

1.7. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan mampu mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang selama Tahun 2025. Pencapaian kinerja (*performance results*) 2025 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) 2025 sehingga dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dengan melaksanakan Analisis atas capaian kinerja yaitu memperbandingkan dan menghitung rencana kinerja dengan capaian kinerja maka akan diperoleh selisih yang dapat kita sebut dengan celah kinerja (*performance gap*). Upaya untuk mencapai celah kinerja ini diharapkan akan dapat dilakukan peningkatan kinerja yang berguna untuk perbaikan kinerja di masa datang.

Dalam menyajikan LKjIP Tahun 2025 ini kami menyusun sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN : Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi Organisasi.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA : Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2025.

BAB III.AKUNTABILITAS KINERJA : Pada Bab ini disajikan 2 (Dua) Sub Bagian yaitu mengenai Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran Organisasi Tahun 2025.

BAB IV. PENUTUP : Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN :

1. Indikator Kinerja Utama (IKU);
2. Data Pendukung LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2025,
yaitu :

Data Indikator Pendukung Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari arah dan kebijakan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan. Pada Dinas Komunikasi dan Informatika di implementasikan dalam pernyataan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika serta perjanjian kinerja sekretaris dan para Kepala Bidang. Strategi pencapaiannya digambarkan pada peta strategi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai target kinerja yang ditetapkan dan akan direalisasikan secara berkala pada periode masing-masing. Target kinerja tahun 2025 dijabarkan melalui tahapan-tahapan dan target kinerja triwulanan Dinas Komunikasi dan Informatika.

3.1. Rencana Strategis

1. Rencana strategis yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai melalui visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Bagian – bagian dari Rencana Strategis pada Dinas Komunikasi an Informatika Kabupaten Tulang Bawang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Visi

Sebagai salah satu unsur perangkat daerah di jajaran Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Tulang Bawang turut mendukung visi Kepala Daerah yaitu:

“Tulang Bawang Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

2. Misi

Menuju pencapaian visi tersebut maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang turut andil dalam pencapaian Misi 3 (tiga) yaitu:

“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif, Berkualitas dan Akuntabel”

3. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai selama 5 tahun dalam upaya mendukung pelaksanaan misi ke 3 adalah yaitu:

“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)”

2. Tujuan Rencana Strategis Dinas Kominfo

Berdasarkan telaah visi dan misi RPJMD sebagaimana diuraikan di atas, maka perlu disusun tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih. Tujuan dari Dinas Komunikasi dan informatika untuk jangka Waktu lima tahun mendatang (2025-2029) sebagai berikut :

“Mewujudkan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif, Akuntabel dan Berbasis Digital”

3. Sasaran Strategis Dinas Kominfo

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang mempunyai tujuan strategis Mewujudkan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif, Akuntabel dan Berbasis Digital. Sasaran strategis yang hendak dicapai pada tahun 2025 sesuai Renstra-SKPD Tahun 2025 – 2029 adalah :

Tabel 2.1 Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan Dan Sasaran	Target	Sasaran Program	Target
1	2	3	4	5	6
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif, Akuntabel dan Berbasis Digital	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas komunikasi dan Informatika	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika	71,26	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100,00
	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	95,50	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Website Aktif	60,00
	Meningkatnya Kualitas Implementasi e-Government	Domain Layanan SPBE	3,70	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	65,00
		Nilai Aspek Teknologi Digital pada Indeks Pemerintahan Digital (Indeks PemDi)	0,00		
	Meningkatnya Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,21	Persentase OPD yang menyediakan dan mengupdate data sektoral sesuai standar serta cakupan ketersediaan data dasar pembangunan	100,00
	Meningkatnya Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Siber dan Sandi	2,40	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	50,00

3.2. Indikator Kinerja Utama

Kesesuaian tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang yaitu "Mewujudkan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif, Akuntabel dan Berbasis Digital" dituangkan kedalam indikator yang dimasukkan dalam IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang yang dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika

Indikator Tujuan Dan Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	5	6	7	8	9	10
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika	71,26	71,35	71,50	72,05	72,30	73,10
Indeks Keterbukaan Informasi Publik	95,50	96,20	97,00	97,70	98,40	99,00
Domain Layanan SPBE	3,70	-	-	-	-	-
Nilai Aspek Teknologi Digital pada Indeks Pemerintahan Digital (Indeks PemDi)	0,00	3,10	3,25	3,46	3,52	3,76
Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,21	2,37	2,53	2,71	2,90	3,10
Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Siber dan Sandi	2,40	2,70	3,00	3,30	3,60	3,90

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya

harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2025 sebagai Berikut:

Tabel 2.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Setelah Pengurangan (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah (%)	100%	4.921.887.296
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tepat waktu (%)	100%	10.167.600
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan	10.167.600
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran (%)	90%	4.189.752.146
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang	3.465.566.346
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	709.945.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16 Laporan	6.790.000

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Setelah Pengurangan (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	16 Laporan	7.450.800
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan administrasi barang milik daerah yang dilaksanakan (%)	100%	135.960.000
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Unit	135.960.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawain Dinas Komunikasi dan Informatika (%)	100%	52.386.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Unit	52.386.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100%	533.621.550
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Paket	114.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	419.621.550
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei) (%)	65%	2.006.410.300
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	65%	2.006.410.300

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Setelah Pengurangan (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	3 Laporan	1.818.198.200
Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	1 Rekomendasi	69.769.000
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	12 Permohonan	13.685.000
Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	365 Konten	94.654.000
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	24%	10.104.100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Website Aktif (%)	60%	3.497.813.000
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan e-government(%)	60%	3.497.813.000
Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	3 Aplikasi	3.222.813.000
Penyediaan Akses Internet	Jumlah PD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh dinas	1 Perangkat Daerah	275.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Setelah Pengurangan (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menyediakan dan mengupdate data sektoral sesuai standar serta cakupan ketersediaan data dasar pembangunan (%)	100%	10.444.000
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Daerah Kabupaten Tulang Bawang (%)	100%	10.444.000
Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data	80%	10.444.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (%)	50%	13.528.000
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data dan Sistem Informasi milik Pemerintah Daerah yang di amankan sesuai dengan prinsip manajemen keamanan informasi (%)	50%	13.528.000
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 Laporan	13.528.000
JUMLAH			10.450.082.596

3.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

- Sebagai wujud komitmen antara penerima dan pemberi Amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2025 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Tulang Bawang untuk mewujudkan target kinerja.

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas komunikasi dan Informatika	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	
3.	Meningkatnya Kualitas Implementasi e-Government	Nilai Aspek Teknologi Digital pada Indeks Pemerintahan Digital (Indeks PemDi)	
4.	Meningkatnya Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	
5.	Meningkatnya Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Siber dan Sandi	

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tepat waktu	100%
2.	Meningkatnya penatausahaan administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase realisasi anggaran	90%
3.	Meningkatnya	Persentase pemenuhan	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	kualitas pelayanan administrasi Perangkat Daerah	pelayanan administrasi Perangkat Daerah	
4.	Meningkatnya jangka waktu pengoperasian barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang di fasilitasi	100%
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Kab. Tulang Bawang	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	65%
6.	Meningkatnya kualitas pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang	Persentase perangkat daerah yang menerapkan e-government	60%
7.	Meningkatnya Keamanan informasi milik pemerintah daerah Kab. Tulang Bawang melalui penyelenggaraan persandian	Persentase Data dan Sistem Informasi milik Pemerintah Daerah yang di amankan sesuai dengan prinsip manajemen keamanan informasi	50%
8.	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral di lingkup pemerintah daerah Kab. Tulang Bawang	Persentase Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Statistik Sektoral di lingkup Daerah Kabupaten Tulang Bawang	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan menjamin efisiensi dan efektivitas. Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang perlu melakukan pengukuran kinerja Tahun 2025.

Pengukuran diperoleh dengan cara membandingkan antara kinerja yang ditargetkan dengan realisasinya. Pengukuran kinerja dapat dilakukan secara berkala bulanan/ triwulan/ semesteran/ tahunan. Namun yang disajikan dalam Laporan Kinerja adalah hasil pengukuran kinerja tahunan. Untuk memudahkan pengelolaan kinerja, maka data kinerja harus dikumpulkan dan dirangkum dengan memperhatikan indikator kinerja yang digunakan.

3.1.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala pengukuran Kinerja dan Peringkat Kinerja

NO	PENILAIAN KINERJA	PERINGKAT KINERJA
1	95 s/d 100	Sangat berhasil
2	80 s/d <95	Berhasil
3	50 s/d <80	Cukup Berhasil
4	0 s/d <50	Kurang Berhasil

3.1.2. Pengukuran Kinerja Tahun 2025

3.1.2.1. Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis

Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2 Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2025

No	Tujuan /Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target dan Capaian Kinerja		
				Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
A. INDIKATOR TUJUAN						
1	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif, Akuntabel dan Berbasis Digital	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	3,28	3,38	103%
		Indeks Pemerintahan Digital (PemDi)	Angka	0,00	0,00	0%
B. INDIKATOR SASARAN						
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas komunikasi dan Informatika	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika	Angka	71,26	Sedang Evaluasi	0%
3	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Angka	95,50	98	103%

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target dan Capaian Kinerja		
				Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
4	Meningkatnya Kualitas Implementasi e-Government	Domain Layanan SPBE	Angka	3,70	4,08	110%
		Nilai Aspek Teknologi Digital pada Indeks Pemerintahan Digital (Indeks PemDi)	Angka	0,00	0,00	0%
5	Meningkatnya Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Angka	2,21	2,21	100%
6	Meningkatnya Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Siber dan Sandi	Angka	2,40	2,40	100%

3.1.2.2. Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2025

Capaian kinerja sasaran dan program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang menurut sasaran kinerjanya dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Program Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Capaian Kinerja			Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi i Kinerja	Capaian Kinerja (%)
				Target Kinerja	Realisasi i Kinerja	Capaian Kinerja (%)					
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja	Angka	71,26	Sedang Evaluasi	0%	Program Penunjang Urusan	Persentase Pemenuhan Layanan	100	100	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Capaian Kinerja			Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
				Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)					
	komunikasi dan Informatika	Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika					Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penunjang Urusan Perangkat Daerah (%)			
2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Angka	95,50	98	103%	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei) (%)	65	81,70	125%
3	Meningkatnya Kualitas Implementasi e-Government	Domain Layanan SPBE	Angka	3,70	4,08	110%	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Website Aktif (%)	60	100	166%
		Nilai Aspek Teknologi Digital pada Indeks Pemerintahan Digital (Indeks PemDi)	Angka	0,00	0,00	0%					
4	Meningkatnya	Indeks	Angka	2,21	2,21	100%	Program	Persentase OPD	100	100	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Capaian Kinerja			Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
				Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)					
	Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Pembangunan Statistik (IPS)					Penyelenggaraan Statistik Sektoral	yang menyediakan dan mengupdate data sektoral sesuai standar serta cakupan ketersediaan data dasar pembangunan (%)			
5	Meningkatnya Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Siber dan Sandi	Angka	2,40	2,40	100%	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (%)	50	44,9	90%

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja sasaran Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang terdapat 5 program pada tahun 2025 antara lain:

- a) Program Aplikasi Informatika;
- b) Program Informasi dan Komunikasi Publik;
- c) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- d) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi;
- e) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Efektivitas kinerja program Dinas Komunikasi dan Informatika menunjukkan efektivitas yang tinggi ditandai dengan rata-rata ketercapaian kinerja program sesuai renja dengan rata - rata presentase 116%. Daya dukung efektivitas program adanya koordinasi yang baik antara pimpinan dan pelaksana, juga adanya budaya kerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang baik sehingga kinerja tahun 2025 dapat diselesaikan dengan sangat baik.

3.1.2.3. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025

Capaian kinerja program secara penjenjangan kinerja dan cascading didukung dari capaian kegiatan di bawahnya. Capaian indikator program yang baik diikuti oleh capaian kinerja kegiatan yang baik pula. Capaian target indikator kegiatan menunjukkan hasil yang efektif dengan ketercapaian kinerja 100%, sesuai dengan Rencana Kerja tahun 2025. Kesiapan SDM, fasilitas dan budaya kerja menjadi pendorong tercapainya target sasaran tersebut. Penyesuaian target kinerja dan capaian kegiatan dapat dilihat secara lengkap pada tabel di bawah :

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2025

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Realisasi	Capaian	Pejabat
Urusan Pemerintah Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah (%)	100%	100%	100%	Sekretaris
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Tepat Waktu (%)	100%	100%	100%	Sekretaris
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	11 Laporan	11 Laporan	100	Kasubbag UK
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran (%)	90%	95%	106%	Sekretaris
Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan Asn	33 Orang	29 Orang	88	Kasubbag UK
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	12 Dokumen	12 Dokumen	100	Kasubbag UK
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	1 Laporan	1 Laporan	100	Kasubbag UK

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Realisasi	Capaian	Pejabat
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Skpd	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan / Semesteran Skpd Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran Skpd	16 Laporan	16 Laporan	100	Kasubbag UK
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Dilaksanakan (%)	100%	100%	100%	Sekretaris
Pengamanan Barang Milik Daerah Skpd	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah Skpd	4 Unit	4 Unit	100	Kasubbag UK
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawain Dinas Komunikasi Dan Informatika (%)	100%	100%	100%	Sekretaris
Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	1 Orang	2 Orang	100	Kasubbag UK
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100%	100%	100%	Sekretaris
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Paket	12 Paket	100	Kasubbag UK
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100	Kasubbag UK
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika					
Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses Dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survei) (%)	65%	82%	126%	Kabid Informasi dan komunikasi Publik

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Realisasi	Capaian	Pejabat
Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	65%	82%	126%	Kabid Informasi dan komunikasi Publik
Relasi Media	Jumlah Aktivitas Relasi Media Kepada Media Yang Memenuhi Kriteria Sebagai Berikut: 1. Terverifikasi Dewan Pers, Dan 2. Terdaftar Di Dinas Kominfo, Dan 3. Aktif Dalam Kegiatan Relasi Media	3 Laporan	3 Laporan	100%	Jf Pranata Humas
Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik Yang Disusun	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100%	Jf Pranata Humas
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Diselesaikan Sesuai Peraturan Perundangan	12 Permohonan	12 Permohonan	100%	Jf Pranata Humas
Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	365 Konten	1335 Konten	366%	Jf Pranata Humas
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah Asn Bidang Komunikasi Publik Yang Difasilitasi Mengikuti Bimtek/Pelatihan	1 Orang%	1 Orang	100%	Jf Pranata Humas
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika					
Program Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Website Aktif (%)	60%	100%	167%	Kabid Aplikasi Informatika
Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan E-Government(%)	60%	100%	167%	Kabid Aplikasi Informatika

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Realisasi	Capaian	Pejabat
Koordinasi Pembangunan Dan/Atau Pengembangan Aplikasi Khusus Yang Sesuai Dengan Arsitektur Dan Peta Rencana Spbe Pemerintah Daerah, Serta Pemanfaatan Aplikasi Umum Spbe	Jumlah Aplikasi Khusus Yang Dibangun Dan/Atau Dikembangkan Sesuai Dengan Ketentuan Atau Regulasi Tentang Standar Teknis Dan Prosedur Pembangunan Dan Pengembangan Aplikasi Spbe	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100	Jf Pranata komputer
Penyediaan Akses Internet	Jumlah Pd Yang Memanfaatkan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	100	Jf Pranata komputer
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik					
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Opd Yang Menyediakan Dan Mengupdate Data Sektoral Sesuai Standar Serta Cakupan Ketersediaan Data Dasar Pembangunan (%)	100%	100%	100%	Kabid Statistik
Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah Yang Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten Tulang Bawang (%)	100%	100%	100%	Kabid Statistik
Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase Kegiatan Statistik Sektoral Yang Hasilnya Dapat Diakses Oleh Pengguna Data	80%	80%	100%	Jf Pranata Komputer
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian					
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (%)	50%	50%	100%	Kabid Persandian dan Kemanan Informasi

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Realisasi	Capaian	Pejabat
Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Dan Sistem Informasi Milik Pemerintah Daerah Yang Di Amankan Sesuai Dengan Prinsip Manajemen Keamanan Informasi (%)	50%	50%	100%	Kabid Persandian dan Kemanan Informasi
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik Dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik Dan Non Elektronik	12 Laporan	12 Laporan	100	Jf Analisis Kebijakan

3.1.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023-2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika	Angka	71,10	71,66	101%	71,18	72,35	102%	71,26	(sedang Evaluasi)	
2.	Nilai Indeks Kepuasan masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik	Angka	80,96	81	100%	81,25	81,50	100%	-	-	-

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
3.	Indeks Domain Kebijakan SPBE	Angka	2,65	3,00	113%	2,98	3,70	124%	-	-	-
4.	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Angka	1,80	2,00	111%	1,90	2,10	110%	-	-	-
5.	Indeks Domain Manajemen SPBE	Angka	1,05	1,09	103%	1,10	1,00	91%	-	-	-
6.	Indeks Domain Layanan SPBE	Angka	2,80	3,25	116%	3,00	3,69	123%	3,70	4,08	110%
7.	Persentase Dinas Komunikasi dan Informatika yang terlayani pengamanan data dan informasi	Angka	60,85	71,43	117%	61,63	100	162%	-	-	-
7.	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Angka	-	-	-	-	-	-	95,50	98	103%
8.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Angka	-	-	-	-	-	-	2,21	2,21	100%
9.	Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Siber dan Sandi	Angka	-	-	-	-	-	-	2,40	2,40	100%

Capaian kinerja di tahun 2025 terealisasi dengan baik dan telah melampaui target yang ditetapkan, demikian juga di tahun-tahun sebelumnya secara keseluruhan. Rata-rata capaian kinerja menunjukkan sebesar %, sedangkan untuk capaian kinerja tahun 2024 sebesar 116% dan untuk capaian kinerja tahun 2023 sebesar 108%.

3.1.4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Akhir RPJMD

3.1.4.1. Perbandingan Capaian Kinerja Utama

Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja Utama terhadap Target RPJMD

Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,2	2,55	116%	2,94	2,85	97%	3,28	3,38	103%
Indeks Pemerintahan Digital (PemDi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sebagaimana tabel di atas, capaian Indeks SPBE di Tahun 2025 mencapai skor 3,38 atau sebesar 103 % dari target yang telah ditentukan, sedangkan untuk Indeks PemDi pada tahun 2023 - 2025 belum dilaksanakan dan akan dilaksanakan pada tahun 2026.

Tentunya Dinas Komunikasi dan Informatika berkomitmen untuk mempertahankan capaian Indeks SPBE hingga akhir periode RPJMD melalui penguatan infrastruktur TIK, integrasi layanan digital, peningkatan keamanan siber, serta optimalisasi interoperabilitas data dan sistem. Langkah ini bertujuan untuk

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan berbasis teknologi guna mendukung transformasi digital sektor publik.

3.1.4.2. Perbandingan Capaian Kinerja Program

Tabel 3.7 Capaian Indikator Kinerja Program

Program	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah (%)	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei) (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65	81,70	125%

Program	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	Persentase informasi publik yang terpublish tepat waktu	80	100	125%	90	100	111%	n/a	n/a	n/a
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Website Aktif (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60	100	166%
	Meningkatnya penerapan egovernment di lingkungan perangkat daerah	80	100	125%	90	100	111%	n/a	n/a	n/a
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menyediakan dan mengupdate data sektoral sesuai standar serta cakupan ketersediaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100	100%

Program	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	data dasar pembangunan (%)									
	Persentase data statistik sektoral yang update	80	100	125%	90	100	111%	n/a	n/a	n/a
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50	44,9	90%
	Persentase informasi daerah yang aman	80	80	100%	90	100	111%	n/a	n/a	n/a

Sebagaimana ditampilkan tabel di atas, menunjukkan tren capaian indikator kinerja program mayoritas tercapai dari tahun 2023 s.d 2025, dimana masing-masing program pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang memiliki realisasi 100 persen atau di atas 100 persen dari target kinerja yang di selenggarakan. Terdapat perbedaan indikator target kinerja dikarenakan pada tahun 2025 indikator target program sudah mengacu kepada RPJMD Kabupaten Tulang Bawang tahun 2025-2029 sedangkan tahun 2023 s.d 2024 mengacu kepada RPD Kabupaten Tulang Bawang.

3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

3.1.5.1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka untuk mencapai sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas komunikasi dan Informatika menggunakan indikator sasaran yaitu Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika). SAKIP ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penilaian atas fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga

dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Mekanisme evaluasi SAKIP terdiri dari beberapa komponen dan sub komponen yang memiliki bobot penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Evaluasi SAKIP berfokus pada implementasi Sistem SAKIP yaitu 80% pelaksanaan sistem dan 20% capaian kinerja. Adapun komponen penilaian SAKIP dijelaskan dalam gambar berikut:



Gambar 3.1 Komponen Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Nilai SAKIP untuk tahun 2025 sampai dengan laporan ini dibuat, belum dapat ditentukan capaian kinerja karena nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika dari Kementerian belum diketahui, namun berdasarkan usaha yang telah dilakukan terhadap peningkatan nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika seperti adanya desk SAKIP, evaluasi SAKIP oleh tim internal kabupaten dan penyelesaian dokumen perencanaan dan keuangan yang tepat waktu diharapkan nilai SAKIP Dinas

Komunikasi dan Informatika tahun 2025 akan meningkat sesuai dengan target yang telah ditetapkan.



Gambar 3.2 Evaluasi SAKIP Oleh Inspektorat

3.1.5.2. Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) adalah instrumen strategis yang dirilis oleh Komisi Informasi Pusat RI untuk mengukur implementasi keterbukaan informasi di Indonesia. IKIP menilai komitmen badan publik dalam transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan informasi melalui tiga lingkungan: hukum, fisik-politik, dan ekonomi.

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu fondasi penting dalam tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Di era digital saat ini, akses terhadap informasi menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan publik. Di Indonesia, lahirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka.

Mengukur keterbukaan informasi bukan hanya soal seberapa banyak informasi yang dapat diakses oleh publik, tetapi juga kualitas dan relevansi informasi tersebut. Informasi yang tersedia harus benar, akurat, dan bertanggung jawab, sebagaimana diamanatkan oleh UU KIP. Dalam konteks ini, salah satu indikator penting adalah keterlibatan masyarakat dalam mengakses informasi. Semakin banyak warga yang memanfaatkan hak akses informasi, semakin efektif pula implementasi keterbukaan informasi publik.

Selain partisipasi masyarakat, indikator lain yang bisa digunakan untuk mengukur keterbukaan informasi adalah kecepatan dan kemudahan akses informasi. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, diharapkan mampu menyediakan informasi secara proaktif melalui platform digital atau media lainnya. Penggunaan teknologi digital memegang peranan penting dalam memastikan bahwa informasi dapat diakses secara cepat dan efisien. Dalam upaya meningkatkan keterbukaan informasi, evaluasi terhadap kinerja Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) juga sangat penting. PPID berperan sebagai ujung tombak dalam menyediakan dan mengelola informasi publik di berbagai instansi pemerintahan. Dengan adanya evaluasi rutin, pemerintah dapat menilai seberapa efektif PPID dalam menjalankan fungsinya, serta menemukan kendala yang dihadapi dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat.

Secara keseluruhan rincian indikator Keterbukaan Informasi Publik sebagai berikut:

1. Ketersediaan Informasi Publik

- Tersedianya Daftar Informasi Publik (DIP) yang mutakhir dan terdokumentasi.
- Informasi berkala, serta-merta, dan setiap saat tersedia sesuai ketentuan.
- Kelengkapan dokumen kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah daerah.

2. Kualitas Pelayanan Informasi Publik

- Pelayanan permohonan informasi sesuai standar layanan PPID.
- Waktu penyelesaian permohonan informasi tepat waktu sesuai regulasi.
- Tersedianya SOP pelayanan informasi publik yang diterapkan secara konsisten.

3. Pengelolaan dan Dokumentasi Informasi

- Sistem pengelolaan arsip dan dokumentasi informasi yang tertib dan terintegrasi.
- Pemanfaatan media digital/website resmi sebagai sarana penyebarluasan informasi.
- Informasi disajikan secara jelas, akurat, dan mudah diakses masyarakat.

4. Penanganan Pengaduan dan Keberatan

- Optimalisasi pengelolaan pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR.
- Tersedianya mekanisme keberatan informasi publik yang jelas dan transparan.
- Penyelesaian pengaduan dan keberatan tepat waktu dan terdokumentasi.

5. Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi

- Pengembangan layanan informasi publik berbasis digital.
- Integrasi layanan informasi dengan aplikasi pengaduan dan website resmi.

- Inovasi dalam penyajian informasi yang ramah pengguna.
6. Komitmen dan Dukungan Pimpinan
- Dukungan kebijakan pimpinan daerah terhadap keterbukaan informasi publik.
 - Penetapan dan penguatan peran PPID Utama dan PPID Pelaksana.
 - Monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi.
7. Kepatuhan terhadap Regulasi
- Implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - Kepatuhan terhadap Peraturan Komisi Informasi terkait standar layanan informasi.
 - Tidak adanya sengketa informasi atau sengketa dapat diselesaikan dengan baik.



Gambar 3.3 Penerimaan Penghargaan Badan Publik Informatika pada KIP Lampung 2025

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Tulang Bawang berjalan sangat baik, terbukti dengan diraihnya predikat "Badan Publik Informatif" pada KIP Awards Lampung 2025

dengan nilai 98. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang memaksimalkan peran PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yaitu penguatan fungsi PPID di tingkat Dinas Komunikasi dan Informatika serta perangkat daerah lainnya dan teknologi digital yaitu dengan gencar mensosialisasikan layanan informasi publik berbasis digital dan menggunakan situs resmi serta media sosial Pemkab. Tulang Bawang untuk memudahkan akses informasi, sejalan dengan visi "UDANG MANIS", untuk menghadirkan pelayanan informasi yang transparan, cepat, dan akuntabel.

3.1.5.3. Domain Layanan SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan SPBE. Pada tahun 2025, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2024.

Penilaian Pemantauan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui

kegiatan penilaian mandiri dan penilaian dokumen. Untuk mengukur Indeks SPBE di bagi kedalam 4 domain SPBE yang terdiri dari 8 aspek penilaian yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

PEMANTAUAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2025																					
Domain dan Aspek Penilaian		Bobot	Predikat Indeks SPBE																		
Domain 1 - Kebijakan SPBE		13%	<table><tr><th>NO</th><th>NILAI INDEKS</th><th>PREDIKAT</th></tr><tr><td>1</td><td>4,2 – 5,0</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>2</td><td>3,5 – < 4,2</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>2,6 – < 3,5</td><td>Baik *)</td></tr><tr><td>4</td><td>1,8 – < 2,6</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>5</td><td>< 1,8</td><td>Kurang</td></tr></table> *) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang
NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT																			
1	4,2 – 5,0	Memuaskan																			
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik																			
3	2,6 – < 3,5	Baik *)																			
4	1,8 – < 2,6	Cukup																			
5	< 1,8	Kurang																			
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE		13%																			
Domain 2 - Tata Kelola SPBE		25%																			
Aspek 2 - Perencanaan Strategis		10%																			
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi		10%																			
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE		5%																			
Domain 3 - Manajemen SPBE		16,5%																			
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE		12%																			
Aspek 6 - Audit TIK		4,5%																			
Domain 4 - Layanan SPBE		45,5%																			
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik		27,5%																			
Aspek 8 - Layanan Publik		18%																			

*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

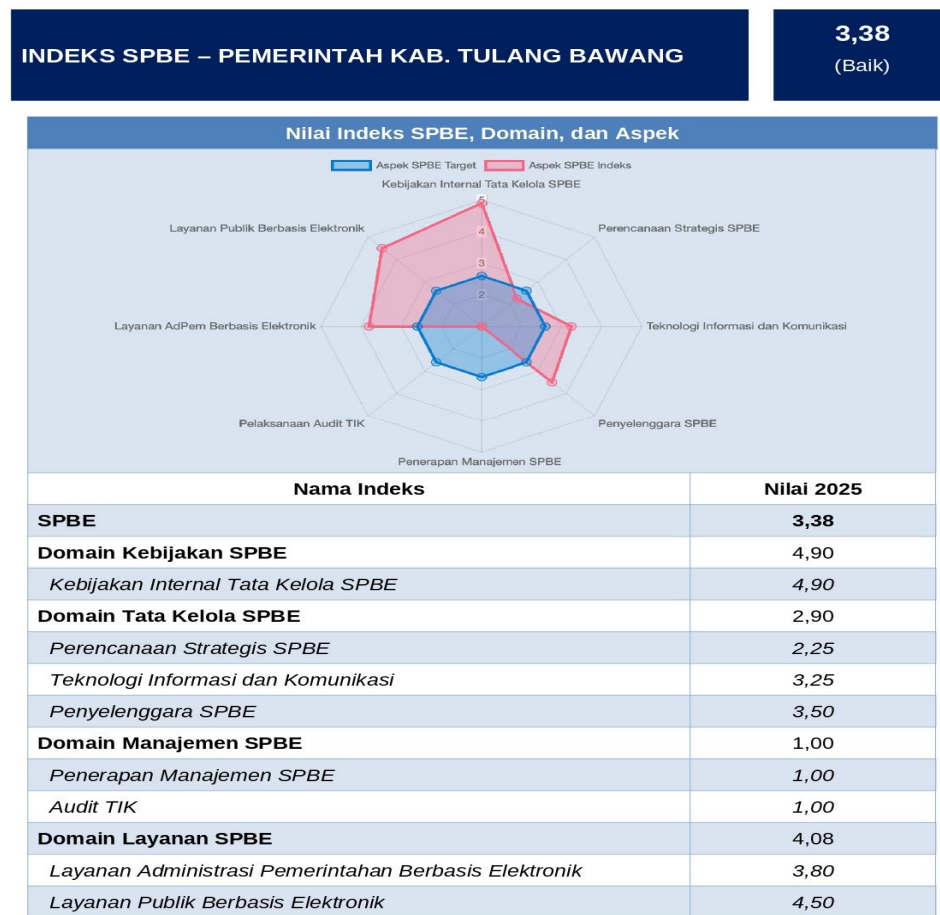
Gambar 3.4 Pemantauan SPBE Tahun 2025

Tujuan SPBE adalah untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik di instansi pusat maupun pemerintah daerah. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap instansi pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan gambar pemantauan SPBE tahun 2025 diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang menjadikan Domain Layanan SPBE untuk menjadi Indikator Kinerja Dinas Guna Mendukung Indikator Kinerja Bupati yaitu Indeks SPBE.

Domain Layanan SPBE adalah area penilaian dalam evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang berfokus pada implementasi layanan/aplikasi (administrasi pemerintahan dan publik) untuk meningkatkan tata kelola dan efisiensi. Dengan

bobot tertinggi (45,5%), domain ini mencakup layanan perencanaan, keuangan, kepegawaian, serta layanan publik terpadu.

Berdasarkan hasil penilaian SPBE pada tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang mendapatkan hasil yang baik dengan skor indeks 3,38 atau dengan predikat “Baik”, secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 3.5 Penilaian Indeks SPBE Pemkab. Tulang Bawang Tahun 2025

Berdasarkan gambar diatas juga diketahui bahwa pada Domain Layanan SPBE yang juga menjadi Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dimana realisasi nilai sebesar 4,08 menunjukkan bahwa penyelenggaraan layanan SPBE pada Dinas

Komunikasi dan Informatika telah melampaui target yang ditetapkan, dengan kategori Baik hingga Sangat Baik, didukung oleh peningkatan integrasi aplikasi, optimalisasi layanan digital, serta peningkatan kualitas tata kelola layanan elektronik kepada perangkat daerah dan masyarakat. Keberhasilan indikator ini didukung pula oleh :

- Adanya komitmen pimpinan daerah dan perangkat daerah dalam mendukung percepatan implementasi SPBE.
- Ketersediaan infrastruktur TIK yang memadai, termasuk jaringan, server, dan pusat data.
- Peningkatan kapasitas SDM TIK, baik melalui pelatihan maupun pendampingan teknis.
- Koordinasi dan kolaborasi yang baik antar perangkat daerah dalam pengembangan dan pemanfaatan aplikasi SPBE.
- Adanya kebijakan dan regulasi daerah yang mendukung penerapan SPBE.



Gambar 3.6 Pelaksanaan Penilaian Indeks SPBE tahun 2025

3.1.5.4. Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.

Indeks Pembangunan Statistik (IPS) adalah ukuran tingkat kematangan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral dan Satu Data Indonesia (SDI) di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah, yang diperoleh melalui Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) oleh Badan Pusat Statistik.

Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) dilaksanakan untuk mengukur capaian penyelenggaraan satu data indonesia dan penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral dengan cara mengukur tingkat kematangan (*maturity level*) dari penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah yang direpresentasikan dalam bentuk nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS).

Nilai indeks pembangunan statistik merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pembangunan statistik dan penyelenggaraan Statistik Sektoral secara keseluruhan. IPS bertujuan memantau, mengevaluasi, dan menyusun strategi pembinaan statistik sektoral dengan predikat nilai mulai dari kurang, cukup, baik, sangat baik, hingga memuaskan.

Nilai Indeks diberikan predikat yang merepresentasikan tingkat kematangan pembangunan statistik dan penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan pengelompokan berdasarkan kategori seperti tertera pada Tabel berikut :

Tabel 3.8 Predikat Penilaian Tingkat Kematangan

Nilai Indeks	Predikat
4,2 – 5,0	Memuaskan
3,5 – < 4,2	Sangat Baik
2,6 – < 3,5	Baik
1,8 – < 2,6	Cukup
< 1,8	Kurang

Tingkat kematangan kapabilitas proses merupakan pengukuran kemampuan organisasi pada suatu proses yang digunakan untuk pengukuran tingkat kematangan kebijakan, tata kelola, dan manajemen penyelenggaraan Statistik Sektoral. Tingkat kematangan kapabilitas proses diukur dengan 5 (lima) tingkatan yaitu rintisan, terkelola, terdefinisi, terpadu dan terukur, dan optimum. Kriteria tingkat kematangan kapabilitas proses dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.9 Kriteria Tingkat Kematangan

Kriteria Umum Proses		
Level	Tingkat	Kriteria
1	Rintisan	Proses penyelenggaraan Statistik Sektoral belum dilakukan oleh seluruh unit kerja.
2	Terkelola	Proses penyelenggaraan Statistik Sektoral telah dilakukan oleh seluruh unit kerja, namun masih menggunakan standar yang hanya berlaku di unit kerja itu sendiri. Jika standar yang digunakan juga diterapkan pada sebagian unit kerja lain dalam satu organisasi yang sama, maka masih berada di level ini.
3	Terdefinisi	Proses penyelenggaraan Statistik Sektoral telah diharmonisasi dan kemudian ditetapkan sebuah standar/pedoman oleh unit yang melaksanakan fungsi manajemen dan berlaku untuk seluruh unit kerja dalam organisasi.

Kriteria Umum Proses		
Level	Tingkat	Kriteria
4	Terpadu dan Terukur	Proses penyelenggaraan Statistik Sektoral telah dilakukan secara terpadu dan telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penyelenggaraan Statistik Sektoral dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses.
5	Optimum	Proses penyelenggaraan Statistik Sektoral telah dilakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi.

Penilaian pada pelaksanaan penyelenggaraan Statistik Sektoral dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:

1. Domain, merupakan area pelaksanaan penyelenggaraan Statistik Sektoral yang dinilai;
2. Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan penyelenggaraan Statistik Sektoral yang dinilai; dan
3. Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan penyelenggaraan Statistik Sektoral yang dinilai.

Sebuah domain terdiri dari beberapa aspek, dan sebuah aspek terdiri dari satu atau beberapa indikator. Adapun struktur penilaian tingkat kematangan penyelenggaraan Statistik Sektoral dapat dilihat pada Gambar dibawah dalam bentuk hierarki.

DOMAIN	ASPEK & INDIKATOR									
Prinsip Satu Data Indonesia	Standar Data Statistik		Metadata Statistik			Interoperabilitas Data			Kode Referensi dan/atau Data Induk	
	Penerapan Standar Data Statistik (SDS)		Penerapan Metadata Statistik			Penerapan Interoperabilitas Data			Penerapan Kode Referensi	
Kualitas Data	Relevansi		Akurasi	Aktualitas & Ketepatan Waktu		Aksesibilitas			Keterbandingan & Konsistensi	
	Relevansi Data terhadap Pengguna	Proses Identifikasi Kebutuhan Data	Penilaian Akurasi Data	Penjaminan Aktualitas Data	Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasi	Ketersediaan Data untuk Pengguna Data	Akses Media Penyebarluasan Data	Penyediaan Format Data	Keterbandingan Data	Konsistensi Statistik
Proses Bisnis Statistik	Perencanaan Data			Pengumpulan Data		Pemeriksaan Data		Penyebarluasan Data		
	Pendefinisian Kebutuhan Statistik	Desain Statistik	Penyiapan Instrumen	Proses Pengumpulan Data / Akuisisi Data		Pengolahan Data	Analisis Data	Diseminasi Data		
Kelembagaan	Profesionalitas				SDM yang Memadai dan Kapabel		Pengorganisasian Statistik			
	Penjaminan Transparansi Informasi Statistik	Penjaminan Netralitas dan Obyektivitas thd Penggunaan Sumber Data dan Metodologi	Penjaminan Kualitas Data	Penjaminan Konfidensialitas Data	Penerapan Kompetensi SDM Bidang Statistik	Penerapan Kompetensi SDM Bidang Manajemen Data	Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik	Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia	Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik	Pelaksanaan Tugas sebagai Validata
Statistik Nasional	Pemanfaatan Data Statistik			Pengelolaan Kegiatan Statistik				Penguatan SSN Berkelanjutan		
	Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monev, dan/atau Penyusunan Kebijakan	Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Monev, dan/atau Penyusunan Kebijakan	Sosialisasi dan Literasi Data Statistik	Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik				Perencanaan Pembangunan Statistik	Penyebarluasan Data	Pemanfaatan Big Data

Gambar 3.7 Hierarki Domain, Aspek, dan Indikator Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Pelaksanaan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) pada tahun 2025 berjalan dengan baik dengan memenuhi target kinerja yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang yaitu dengan nilai 2,21.



Gambar 3.8 Koordinas Persiapan Pelaksanaan Penilaian EPSS

Keberhasilan indikator ini tentunya di dukung oleh beberapa hal yaitu:

1. Regulasi yang Kuat: Adanya Peraturan Bupati terkait Satu Data Indonesia di tingkat kabupaten.
2. Kolaborasi Antar-OPD: Kesadaran produsen data (OPD lain) dalam menyetorkan data secara tepat waktu.
3. Komitmen Pimpinan: Dukungan anggaran dan kebijakan untuk penguatan metadata dan interoperabilitas data

3.1.5.5. Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Siber dan Sandi

Dalam mendefinisikan Indeks Keamanan Informasi (KAMI) siber dan sandi, dapat dijelaskan bahwa Keamanan Siber adalah upaya adaptif dan inovatif untuk melindungi seluruh lapisan ruang siber, termasuk asset informasi yang ada di dalamnya, dari ancaman dan serangan siber, baik bersifat teknis maupun sosial dan Kematangan Keamanan Siber adalah kondisi yang menggambarkan kapabilitas dan kemajuan organisasi dalam menerapkan, meningkatkan, dan menjalankan Keamanan Siber secara efektif dan efisien.

Mengukur tingkat kematangan dilakukan dengan menggunakan instrumen penilaian, dimana pengukuran tingkat kematangan yang nantinya menghasilkan kategori tingkat kematangan yang apat dilihat dalam table berikut :

Tabel 3.10 Kategori Tingkat Keamanan Informasi

Level	Nilai	Level
1	4,51 – 5,0	Inovatif
2	3,51 – 4,50	Terkelola
3	2,51 – 3,50	Terdefinisi
4	1,51 2,50	Berulang
5	0 – 1,50	Awal

Kategori Tingkat Kematangan level 1 (satu) dengan kriteria sebagai berikut:

1. Menggambarkan kondisi penerapan Keamanan Siber dalam tahap implementasi awal;
2. Penerapan Keamanan Siber belum memiliki prosedur yang terorganisir;
3. Penerapan Keamanan Siber bersifat informal;
4. Keamanan Siber tidak dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan;
5. Dokumen manajemen risiko dan dokumen control belum disusun.

Kategori Tingkat Kematangan level 2 (dua) dengan kriteria sebagai berikut:

1. menggambarkan kondisi penerapan Keamanan Siber dalam tahap implementasi yang berulang;
2. penerapan Keamanan Siber sudah memiliki prosedur yang terorganisir;
3. penerapan Keamanan Siber bersifat informal;
4. Keamanan Siber dilakukan secara berulang namun belum konsisten dan belum berkelanjutan;
5. dokumen manajemen risiko dan dokumen control sudah disusun namun belum ditetapkan.

Kategori Tingkat Kematangan level 3 (tiga) dengan kriteria sebagai berikut:

1. menggambarkan kondisi penerapan Keamanan Siber dalam tahap implementasi yang telah terdefinisi dengan baik;
2. penerapan Keamanan Siber telah terorganisir dengan jelas;
3. penerapan Keamanan Siber bersifat formal;
4. Keamanan Siber dilakukan secara berulang dan konsisten serta direviu secara berkala;

5. dokumen manajemen risiko dan dokumen control sudah disusun dan sudah ditetapkan.

Kategori Tingkat Kematangan level 4 (empat) dengan kriteria sebagai berikut:

1. menggambarkan kondisi penerapan Keamanan Siber dalam tahap implementasi yang telah terkelola dengan baik.
2. penerapan Keamanan Siber telah terorganisir dengan baik namun belum dilakukan proses otomatisasi;
3. penerapan Keamanan Siber bersifat formal;
4. Keamanan Siber dilakukan secara berulang dan implementasi perbaikan dilakukan berkelanjutan;
5. dokumen manajemen risiko dan dokumen control sudah disusun dan sudah ditetapkan.

Kategori Tingkat Kematangan level 5 (lima) dengan kriteria sebagai berikut:

1. menggambarkan kondisi penerapan Keamanan Siber telah diimplementasikan secara optimal;
2. penerapan Keamanan Siber telah terorganisir dengan baik dan telah dilakukan proses otomatisasi;
3. penerapan Keamanan Siber bersifat formal;
4. Keamanan siber dilakukan secara berulang dan konsisten serta telah terintegrasi;
5. keamanan siber menjadi bagian budaya organisasi secara menyeluruh;
6. dokumen manajemen risiko dan dokumen control sudah ditetapkan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan disrupti pola bisnis di era siber yang kini terus terjadi secara dinamis memunculkan risiko dan celah keamanan informasi. Digitalisasi proses kerja menjadikan keamanan informasi menjadi hal yang berpengaruh pada keseluruhan

proses bisnis sehingga sangat penting untuk menjadi perhatian utama.

Keterlibatan pihak ketiga dalam *supply chain* layanan perusahaan menimbulkan risiko baru. Layanan berbasis cloud memberikan peluang efisiensi dan peningkatan kinerja yang sangat signifikan bagi perusahaan namun juga menimbulkan risiko baru terkait data yang berada pada pengendalian pihak penyelenggara layanan. Beberapa aspek kebutuhan keamanan baru tersebut perlu dimitigasi agar bisnis dapat terus berjalan dengan baik.

Indeks Keamanan Informasi (KAMI) merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan asesmen dan evaluasi tingkat kesiapan (Kelengkapan dan Kematangan) penerapan keamanan informasi berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001. Proses evaluasi dilakukan melalui sejumlah pertanyaan di beberapa area berikut:

- Kategori Sistem Elektronik yang digunakan
- Tata Kelola Keamanan Informasi
- Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi
- Kerangka Kerja Keamanan Informasi
- Pengelolaan Aset Informasi
- Teknologi dan Keamanan Informasi
- Suplemen (Tambahan pengukuran dilakukan untuk aspek Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga Penyedia Layanan, Pengamanan Layanan Infrastruktur Awan (Cloud Service) dan Perlindungan Data Pribadi.

Pengelompokan kedua dilakukan berdasarkan tingkat kematangan penerapan pengamanan dengan kategorisasi yang mengacu kepada tingkatan kematangan yang digunakan oleh kerangka kerja COBIT atau CMMI. Tingkat kematangan ini

nantinya akan digunakan sebagai alat untuk melaporkan pemetaan dan pemeringkatan kesiapan keamanan informasi di Kementerian / Lembaga. Untuk keperluan Indeks KAMI, tingkat kematangan tersebut didefinisikan sebagai:

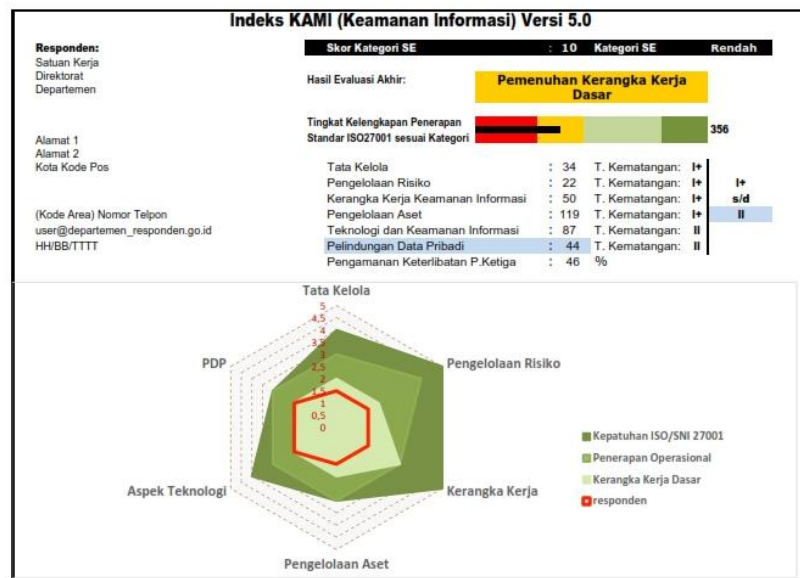
Tingkat I – Kondisi Awal

Tingkat II – Penerapan Kerangka Kerja Dasar

Tingkat III – Terdefinisi dan Konsisten

Tingkat IV – Terkelola dan Terukur

Tingkat V – Optimal



Gambar 3.9 Koordinasi dan Pelaksanaan Indeks Keamanan Informasi (KAMI)

Pelaksanaan Indeks Kemanan Informasi (KAMI) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2025 berjalan dengan baik, terbukti dengan tercapainya indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu dengan nilai 2,40 atau terealisasi 100%.

Keberhasilan indikator ini didukung oleh beberapa hal yaitu :

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mendukung.
2. Tersedia Standar Operasi Prosedur bidang Persandian dan Keamanan Informasi.
3. Tersedia ruangan server sehingga infrastruktur terjaga.

3.1.6. Kendala / Permasalahan

3.1.6.1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika

Pelaksanaan Sistem Kinerja Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang secara konsisten berjalan dengan baik dalam memenuhi target kinerja. Namun masih ada beberapa kendala atau permasalahan yang sering kali ditemui yaitu:

1. Kurangnya komitmen dari perangkat daerah
Keberhasilan implementasi SAKIP didukung dengan keberhasilan dari OPD, sehingga OPD dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap implementasi SAKIP. Komitmen diartikan sebagai tekad organisasi dalam penyelenggaraan SAKIP. Wujud dari komitmen dapat berupa kesadaran akan pekerjaan, sehingga dalam melaksanakan pekerjaan akan mencapai hasil yang maksimal. Hal tersebut akan membantu organisasi dalam mencapai tujuan.

2. Kurangnya Sumberdaya Manusia

Sumberdaya yang mengampu urusan SAKIP relatif sedikit sehingga sering kali penyusunan Sakip sedikit tertunda dan bisa mengakibatkan kurang maksimalnya penilaian Dokumen Sakip.

3.1.6.2. Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Pelaksanaan indeks keterbukaan informasi publik pada tahun 2025 berjalan dengan baik hal ini dibuktikan dengan di capainya kriteria sebagai “Badan Publik Informatika” dengan nilai 98. Keberhasilan dalam mencapai target kinerja juga diiringi dengan beberapa hambatan yang ditemui yaitu:

1. Perbedaan Tingkat Pemahaman OPD terhadap Keterbukaan Informasi

Masih terdapat OPD yang belum sepenuhnya memahami klasifikasi dan standar informasi publik sehingga memerlukan pembinaan dan pendampingan berkelanjutan.

2. Keterbatasan SDM Teknis di Beberapa OPD

Terbatasnya SDM khusus yang menangani PPID Pelaksana di OPD berdampak pada kecepatan penyediaan dan pemutakhiran data dan informasi.

3. Belum Seragamnya Kualitas Data dan Informasi

Perbedaan format, kelengkapan, dan pemutakhiran data antar OPD memerlukan proses verifikasi dan harmonisasi sebelum dipublikasikan.

4. Keterbatasan Infrastruktur Teknologi di Beberapa Unit

Kualitas jaringan dan sarana pendukung TIK yang belum merata dapat mempengaruhi optimalisasi layanan informasi berbasis digital.

5. Tingginya Dinamika Permintaan Informasi Publik

Variasi dan kompleksitas permintaan informasi masyarakat

memerlukan waktu koordinasi lintas OPD untuk memastikan ketepatan dan keakuratan informasi yang diberikan.

3.1.6.3. Domain Layanan SPBE

Pelaksanaan SPBE pada tahun 2025 yang dinilai berjalan dengan baik secara keseluruhan, namun terdapat beberapa kendala yang masih di termui, yaitu :

1. Masih terdapat perangkat daerah yang belum sepenuhnya optimal dalam memanfaatkan aplikasi SPBE.
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di beberapa perangkat daerah yang memiliki kompetensi teknis di bidang teknologi informasi untuk mengelola sistem digital secara optimal.
3. Minimnya Interoperabilitas dan Integrasi dimana Layanan digital sering berjalan sendiri-sendiri (terkotak-kotak), belum terintegrasi antara satu instansi dengan instansi lain
4. Keterbatasan Anggaran yang tersedia belum mampu memenuhi kebutuhan pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur SPBE secara menyeluruh dan berkelanjutan.

3.1.6.4. Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

Kendala utama dalam pelaksanaan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yaitu rendahnya kualitas data akibat minimnya pembinaan, terbatasnya kompetensi SDM dan anggaran yang minim. Secara lebih rinci untuk melihat kendala dalam pelaksanaan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yaitu:

1. Pembinaan dan Komitmen, yaitu pembinaan statistik sektoral belum dilakukan secara menyeluruh di erah, yang mengakibatkan rendahnya kualitas data yang dihasilkan.
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), kurangnya jumlah dan pengetahuan SDM dalam manajemen data serta interpretasi metodologi survei menjadi kendala Utama.

3. Anggaran untuk penyelenggaraan statistik sektoral di daerah seringkali belum tersedia atau minim.
4. Manajemen Risiko, dimana banyak unit kerja belum melakukan penyusunan manajemen risiko, menyulitkan pengukuran kualitas, serta padatnya kegiatan rutin yang menghambat pengisian survei

3.1.6.5. Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Siber dan Sandi

Implementasi Indeks Keamanan Informasi (KAMI) di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) menghadapi berbagai kendala spesifik yang sering menjadi penghambat dalam mencapai skor kematangan tinggi.

1. Kelemahan dalam Tata Kelola dan Dokumentasi
 - Dokumentasi Kebijakan yang Tidak Lengkap, dimana kurangnya ketersediaan dokumen formal seperti Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI), Standar Operasional Prosedur (SOP) teknis, dan dokumen kajian risiko secara berkala.
 - Pengelolaan Aset Informasi, dimana pencapaian dalam aspek pengelolaan aset informasi seringkali rendah karena inventarisasi aset yang tidak terupdate dan klasifikasi data yang belum jelas.
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Ahli
 - Kesenjangan Kompetensi, Pegawai yang ditunjuk seringkali memiliki tugas ganda (*multi-tasking*) sehingga tidak fokus pada pemenuhan indikator Indeks KAMI.
 - Kurangnya Pelatihan Bersertifikat, dimana terbatasnya anggaran untuk mengikutsertakan staf dalam sertifikasi internasional (seperti ISO 27001 Auditor/Implementer) yang menjadi landasan utama penilaian.
3. Masalah Anggaran dan Infrastruktur

- Prioritas Anggaran, anggaran seringkali lebih difokuskan pada pengembangan aplikasi layanan publik (*Output*) daripada penguatan keamanan di balik layar (*Security by Design*).
- Infrastruktur Pendukung, dimana keterbatasan fasilitas seperti *Disaster Recovery Center (DRC)* yang terstandarisasi dan sistem backup otomatis yang belum menyeluruh di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah koordinasi Kominfo.

3.1.7. Strategi / Tindak Lanjut / Upaya Perbaikan

3.1.7.1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan kendala atau permasalahan yang ditemui pada dalam indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika maka dirumuskan strategi atau tindaklanjut yaitu :

1. *Pengoptimalan Komitmen Kerja*
Dinas Komunikasi dan Informatika akan memaksimalkan komitmen kerja yang tertuang dalam dokumen kerja, baik itu Rencana Kerja, Perjanjian Kerja hingga SK Tim Kerja.
2. *Kurangnya Sumberdaya Manusia*
Sumberdaya yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika tergolong terbatas, untuk itu harus memaksimalkan sumberdaya yang ada baik itu pengembangan kompetensi ataupun pembinaan.
3. *Memberikan Reward and Punishment*
Keberhasilan implementasi SAKIP didukung oleh semua elemen pada pemerintahan, Masing-masing pegawai harus memiliki sikap sadar bahwa kinerja yang dilakukan adalah mendukung dalam tercapainya tujuan organisasi, yang tentu akan berdampak pada peningkatan penerapan SAKIP. Upaya

yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja pegawai adalah dengan memberikan *reward* dan *punishment* berbasis kinerja.

3.1.1.1. Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Secara umum, faktor pendukung yang kuat, terutama komitmen pimpinan, tata kelola PPID, dan pemanfaatan teknologi informasi, mampu mengatasi berbagai faktor penghambat sehingga sasaran keterbukaan informasi publik dapat tercapai secara optimal dengan predikat *Informatif*. Lebih lanjut, strategi / tindak lanjut untuk permasalahan yang ada pada indeks keterbukaan informasi publik yaitu:

1. Komitmen Pimpinan Daerah

Dukungan pimpinan daerah melalui kebijakan, arahan strategis, serta penguatan peran PPID mendorong konsistensi pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan menjadi dasar tercapainya predikat *Informatif*.

2. Kelembagaan dan Tata Kelola PPID yang Kuat

Struktur PPID Utama dan PPID Pelaksana yang jelas, didukung SOP dan alur layanan, memastikan pelayanan informasi publik berjalan efektif, terukur, dan sesuai regulasi.

3. Ketersediaan dan Kompetensi SDM

SDM yang memahami regulasi keterbukaan informasi publik serta memiliki kemampuan teknis pengelolaan informasi dan pelayanan publik mendukung ketepatan waktu dan kualitas layanan.

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Optimalisasi website resmi, media digital, dan aplikasi SP4N-LAPOR meningkatkan aksesibilitas informasi, transparansi, serta kecepatan respon terhadap permohonan dan pengaduan masyarakat.

5. Koordinasi dan Sinergi Antar Perangkat Daerah

Koordinasi aktif antara Diskominfo selaku PPID Utama

dengan seluruh OPD memastikan ketersediaan data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terdokumentasi dengan baik.

6. Dukungan Anggaran dan Sarana Prasarana

Tersedianya anggaran serta sarana pendukung menunjang operasional layanan informasi publik, pengembangan sistem, peningkatan kapasitas SDM, dan pelaksanaan monitoring evaluasi.

7. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

Pelaksanaan monev secara rutin menjadi sarana pengendalian kinerja serta dasar perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas layanan informasi publik.

3.1.1.2. Domain Layanan SPBE

Pesatnya perkembangan teknologi informasi (TI) mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan akselerasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Transformasi digital ini difokuskan pada peningkatan kualitas layanan publik agar lebih cepat dan terintegrasi. Untuk itu, Dinas Komunikasi dan Informatika merumuskan strategi / tindaklanjut atas masalah yang ditemui dalam pelaksanaan SPBE pada domain layanan SPBE yaitu:

1. Adanya komitmen pimpinan daerah dan perangkat daerah dalam mendukung percepatan implementasi SPBE.
2. Ketersediaan infrastruktur TIK yang memadai, termasuk jaringan, server, dan pusat data.
3. Peningkatan kapasitas SDM TIK, baik melalui pelatihan maupun pendampingan teknis.
4. Koordinasi dan kolaborasi yang baik antar perangkat daerah dalam pengembangan dan pemanfaatan aplikasi SPBE.

5. Adanya kebijakan dan regulasi daerah yang mendukung penerapan SPBE.

3.1.1.3. Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

Strategi tindak lanjut Indeks Pembangunan Statistik (IPS) merupakan langkah krusial untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah (pemda). IPS, yang diperoleh dari nilai Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS), mencerminkan kematangan proses statistik yang terbagi dalam lima tingkat: rintisan, terkelola, terdefinisi, terpadu dan terukur, serta optimum. Untuk strategi dalam memaksimalkan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) sebagai berikut:

1. Penguatan Komitmen dan Kelembagaan

- Sosialisasi dan Advokasi, Meningkatkan pemahaman pimpinan instansi dan dinas terkait mengenai pentingnya data berkualitas untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan.
- Penetapan Tim Walidata/Produsen Data, Memperjelas peran Tim Satu Data Indonesia (SDI) di daerah untuk menghindari tumpang tindih data.
- Penyusunan Regulasi, Memperkuat legalitas (seperti Peraturan Kepala BPS atau Perkada) untuk menjamin keberlanjutan dan kualitas data sector

2. Perbaikan Proses Bisnis Statistik (Quality Gates)

- Penerapan Quality Gates (QG), Memastikan penjaminan kualitas pada setiap tahap kegiatan statistik, mulai dari perencanaan, pengumpulan, pengolahan, hingga diseminasi, mengacu pada Peraturan BPS terbaru.
- Modernisasi Pengumpulan Data, Mengoptimalkan penggunaan data administrasi (registrasi administratif) dan

big data untuk mengurangi beban responden dan efisiensi anggaran.

3. Peningkatan Kapasitas SDM

- Pelatihan Statistisi/Fungsional, Meningkatkan kompetensi staf terkait metodologi survei, manajemen data, dan analisis data, khususnya dalam penggunaan alat bantu pemrosesan data.
- Workshop Evaluasi EPSS, Melakukan bedah hasil penilaian IPS untuk mengidentifikasi indikator yang masih rendah dan menyusun rencana perbaikan (tindak lanjut) secara detail

4. Optimalisasi Diseminasi dan Pemanfaatan

- Perwajahan Baru Website/Portal Data, Mempermudah akses publik dan pengguna data terhadap data sektoral melalui portal Satu Data Daerah (perwajahan baru).
- Penguatan Layanan Statistik, Memperbaiki layanan baik secara daring maupun luring untuk meningkatkan kepuasan pengguna data.

3.1.1.4. Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Siber dan Sandi

Strategi tindak lanjut setelah melakukan penilaian Indeks Keamanan Informasi (KAMI Siber dan Sandi Negara (BSSN) berfokus pada transisi dari fase evaluasi menuju perbaikan sistematis berbasis standar ISO/IEC 27001, dimana langkah-langkah tersebut yaitu:

1. Analisis Kesenjangan (*Gap Analysis*) & Prioritas

- Identifikasi area dengan skor rendah atau yang berada di "zona merah" untuk menentukan langkah pembenahan yang paling mendesak.
- Evaluasi 5 Area Utama, dengan memfokuskan pada peningkatan di area Tata Kelola, Manajemen Risiko, Kerangka Kerja, Pengelolaan Aset, dan Teknologi.

- Klasifikasi Aset dengan melakukan analisis dan mitigasi risiko pada aset informasi yang memiliki nilai tinggi bagi organisasi.
2. Penguatan Tata Kelola & Kebijakan
- Susun atau perbarui dokumen kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) berdasarkan rekomendasi hasil verifikasi BSSN.
 - Asistensi BSSN, dengan memanfaatkan program asistensi penyusunan dokumen kebijakan dan audit keamanan dari BSSN untuk memperkuat profil keamanan siber.
 - Kepatuhan Regulasi, kebijakan harus selaras dengan Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2024 terkait standar audit keamanan sistem pemerintahan.
3. Implementasi Kontrol Keamanan Teknis
- Tingkatkan keandalan sistem melalui kontrol teknis yang lebih ketat, terutama bagi instansi dengan sistem elektronik kategori Strategis.
 - Cyber Hygiene, Terapkan penggunaan kata sandi kuat, otentikasi multi-faktor (MFA), enkripsi data, dan pembaruan perangkat lunak secara rutin.
 - Manajemen Insiden, dengan membentuk atau perkuat Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT) dan simulasikan prosedur penanganan insiden untuk meminimalkan dampak serangan.
4. Pemantauan dan Peningkatan Berkelanjutan
- Penilaian Indeks KAMI bukan kegiatan sekali jalan, melainkan siklus perbaikan terus-menerus.
 - Monitoring Berkala, melaporkan progres implementasi SMKI dan tindak lanjut audit kepada pimpinan organisasi secara rutin

3.1.7. Analisis Program Kegiatan Penunjang Keberhasilan

Program penunjang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 terdapat 5 program antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik
3. Program Aplikasi Informatika
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Program penunjang indikator kinerja utama serta target dan realisasi kinerja Tahun Anggaran 2025 sebagaimana ditampilkan tabel berikut :

Tabel 3.11 Program Penunjang Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah (%)	100	100	100%
2	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei) (%)	65	81,70	125%
3	Domain Layanan SPBE Nilai Aspek Teknologi Digital pada	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Website Aktif (%)	60	100	166%

No	Indikator Kinerja	Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
	Indeks Pemerintahan Digital (Indeks PemDi)					
4	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menyediakan dan mengupdate data sektoral sesuai standar serta cakupan ketersediaan data dasar pembangunan (%)	100	100	100%
5	Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Siber dan Sandi	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (%)	50	44,9	90%

3.1.7.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan penunjang ketercapaian Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Program penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota merupakan salah satu program utama dalam dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang dirancang untuk mendukung pencapaian sasaran strategis SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Program ini berfokus pada penyediaan sarana, prasarana, administrasi dan keuangan yang memadai agar instansi dapat berkinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Beberapa kegiatan yang dihasilkan sebagai berikut :

1. Penyusunan 8 dokumen perencanaan perangkat daerah;
2. Penyusunan 15 laporan capaian kinerja;

3. Penyusunan 25 laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran dan tahunan;
4. Penyediaan gaji dan tunjangan bagi 29 PNS selama 1 tahun dan PPPK selama 3 Bulan;
5. Fasilitasi pelaksanaan Diklatpim sebanyak 2 orang pegawai;
6. Penyediaan 12 paket komponen instalasi listrik untuk penerangan bangunan kantor;
7. Penyediaan 12 paket peralatan rumah tangga untuk alat dan peralatan kebersihan kantor;
8. Pemeliharaan dan pembayaran pajak untuk 4 unit kendaraan dinas roda 2 dan 3 unit roda 4;
9. Pemeliharaan AC kantor;
10. Pengadaan 2 Unit printer dan 1 unit pengancur kertas;
11. Memfasilitasi urusan kantor secara umum;
12. Penyediaan tenaga Outsourcing programmer, jaringan, operator multimedia, video editor, videografer, fotografer sebanyak 12 Orang.
13. Penyediaan honor PHL, Tenaga Kebersihan dan Penjaga malam untuk 1 tahun dalam rangka pencapaian kinerja untuk memenuhi kebutuhan SDM yang tidak mencukupi jika hanya mengandalkan jumlah PNS yang ada saat ini.

3.1.7.2. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

Dalam rangka menunjang ketercapaian Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2025, dalam program informasi dan komunikasi publik memiliki fungsi pengelolaan dan pelayanan informasi publik publik, penyediaan konten dan akses informasi dengan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :

1. Kerjasama dengan 70 Media, yaitu 24 Media Cetak dan 46 Media Online. Termasuk juga bekerjasama dengan 25 Media yang sudah terverifikasi oleh dewan pers.

2. Melaksanakan pesanan / *order* belanja publikasi melalui e-katalog dengan metode *e-purchasing* sebanyak 151 *order*.
3. Melakukan cetak kalender sebanyak 850 eksemplar yang disebar ke seluruh OPD hingga ke kecamatan dan kelurahan.
4. Melaksanakan hibah ke organisasi media sebanyak 2 organisasi yaitu PWI dan IWO.
5. Melaksanakan pengelolaan SP4N LAPOR dengan rincian pengaduan yang masuk sebanyak 27 dan yang sudah selesai sebanyak 16 laporan dan 11 laporan sedang di tindaklanjuti.
6. Melaksanakan cetak banner dalam rangka penyerluasan informasi luar ruangan sebanyak 22 kali cetak.
7. Pembuatan 1086 Konten di media sosial Facebook dan Instagram, 1511 konten di website Pemkab. Tulang Bawang, 7 konten di X (twitter), 4 konten di youtube dengan total 3932 konten yang di publish Dinas Komunikasi dan Informatika selama tahun 2025.

3.1.7.3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program Aplikasi Informatika merupakan program penunjang indikator domain layanan SPBE pada tahun 2025. Program aplikasi informatika memiliki beberapa kegiatan yaitu:

1. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik tahun 2025 yang terealisasi dengan indeks SPBE sebesar 3,38.
2. Penyediaan Bandwith internet dan penyediaan Wifi Publik di 6 titik.
3. Penyediaan belanja lisensi dengan rincian, lisensi akun developer google play, lisensi zoom meeting, lisensi cloudfare pro, lisensi google play console, lisensi website, lisensi windows dan SSL certificate
4. Menyusun Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2026-2030.

5. Pengadaan Videotron yang ditempatkan di Ruang Rapat Utama Pemkab. Tulang Bawang dan Gedung Serba Guna Pemkab. Tulang Bawang.
6. Pengelolaan dan pengembangan Aplikasi yang ada di Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, termasuk aplikasi SIAP Tuba sebagai aplikasi super app.

3.1.7.4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

Sebagai penunjang ketercapaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS) di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025, dalam Program Penyelenggaraan Statistik Sektor terdapat kegiatan dan hasil kinerja yang dilaksanakan antaralain:

1. Pengelolaan Portal Data Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka mengelola data statistik sektoral Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik.
3. Penyusunan buku Tulang Bawang Dalam Angka tahun 2025.

3.1.7.5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi mendukung ketercapaian indikator kinerja Indeks Kemanan Informasi (KAMI) siber dan sandi. Dalam program ini terdapat kegiatan dan hasil kinerja yang dilaksanakan anataralain:

1. Layanan Tanda Tangan Elektronik (TTE) di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
2. Melaksanakan pemeliharaan dan konfigurasi firewall.
3. Mendapatkan peringkat ke-3 dalam perlombaan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) yang diadakan oleh BSSN.
4. Melaksanakan keamanan informasi melalui email sanapati.

3.2. Akuntabilitas Keuangan

3.2.1. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2025

Sebagai upaya memaksimalkan pelaksanaan indikator kinerja utama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang, faktor keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud, hal ini karena operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung dengan pembiayaan yang memadai. Pada tahun 2025 dilakukan sinkronisasi program dan kegiatan, sehingga anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika dari APBD murni sebesar Rp.10.830.432.492,-, dilaksanakan efisiensi pergeseran anggaran sesuai arahan Presiden RI dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 anggaran pergeseran menjadi Rp.10.426.245.242,- dan pada APBD Perubahan dilakukan penyesuaian kembali sehingga menjadi Rp. 10.450.082.596,-. Disamping itu pada Tahun 2025 terdapat belanja modal sebesar Rp. 2.964.342.300,-.

Capaian kinerja keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang sebesar Rp. 9.239.173.360,- atau 88.41%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya 2024 tidak mengalami kenaikan ataupun kekurangan. Capaian tiap program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.12 Realisasi Anggaran Tahun 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN									CAPAIAN KINERJA	
		TOTAL			BELANJA OPERASI			BELANJA MODAL				
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	RENC.	REAL
		Rp.	Rp.		Rp.	Rp.		Rp.	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	18	19
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.921.887.296	4.576.116.980	92,97	4.921.887.296	4.576.116.980	92,97	-	-	0,00	100%	93%
2	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.167.600	6.243.900	61,41	10.167.600	6.243.900	61,41	-	-	0,00	100%	100%
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.167.600	6.243.900	61,41	10.167.600	6.243.900	61,41	-	-	0,00	11 Laporan	11 Laporan
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.189.752.146	3.983.536.894	95,08	4.189.752.146	3.983.536.894	95,08	-	-	0,00	95%	95%
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.465.566.346	3.308.782.094	95,48	3.465.566.346	3.308.782.094	95,48	-	-	0,00	35 Orang	29 Orang
7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	709.945.000	661.225.000	93,14	709.945.000	661.225.000	93,14	-	-	1,00	12 Dokumen	12 Dokumen
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.790.000	6.079.000	89,53	6.790.000	6.079.000	89,53	-	-	0,00	1 Laporan	1 Laporan
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.450.800	7.450.800	100,00	7.450.800	7.450.800	100,00	-	-	0,00	18 Laporan	18 Laporan

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN									CAPAIAN KINERJA	
		TOTAL			BELANJA OPERASI			BELANJA MODAL				
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	RENC.	REAL
		Rp.	Rp.		Rp.	Rp.		Rp.	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	18	19
10	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	135.960.000	115.280.924	84,79	135.960.000	115.280.924	84,79	-	-	0,00	80%	85%
11	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	135.960.000	115.280.924	84,79	135.960.000	115.280.924	84,79	-	-	0,00	8 Dokumen	8 Dokumen
12	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	52.386.000	39.945.000	0,00	52.386.000	39.945.000	76,25	-	-	0,00	70	76%
14	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	52.386.000	39.945.000	0,00	52.386.000	39.945.000	76,25	-	-	0,00	2 Orang	2 Orang
15	Administrasi Umum Perangkat Daerah	533.621.550	431.110.262	80,79	533.621.550	431.110.262	80,79	-	-	0,00	100%	100%
16	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	114.000.000	85.776.312	75,24	114.000.000	85.776.312	75,24	-	-	0,00	12 Paket	12 Paket
18	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	419.621.550	345.333.950	82,30	419.621.550	345.333.950	82,30	-	-	0,00	1 Dokumen	1 Dokumen
19	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	2.006.410.300	1.356.712.180	67,62	2.006.410.300	1.356.712.180	67,62	-	-	0,00	90%	90%
20	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.006.410.300	1.356.712.180	67,62	2.006.410.300	1.356.712.180	67,62	-	-	0,00	90%	90%
21	Relasi Media	1.818.198.200	1.197.665.510	65,87	1.818.198.200	1.197.665.510	65,87	-	-	0,00	3 Laporan	3 Laporan
22	Pelayanan Informasi Publik	13.685.000	8.435.000	61,64	13.685.000	8.435.000	61,64	-	-	0,00	1 Dokumen	1 Dokumen
23	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	69.769.000	53.941.000	77,31	69.769.000	53.941.000	77,31	-	-	0,00	1 Dokumen	1 Dokumen

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN									CAPAIAN KINERJA	
		TOTAL			BELANJA OPERASI			BELANJA MODAL				
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	RENC.	REAL
		Rp.	Rp.		Rp.	Rp.		Rp.	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	18	19
24	Penyusunan Konten	94.654.000	86.666.570	0,00	94.654.000	86.666.570	0,00	-	-	0,00	5 Konten	5 Konten
25	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	10.104.100	10.004.100	99,01	10.104.100	10.004.100	99,01	-	-	0,00	1 Orang	1 Orang
26	Program Aplikasi Informatika	3.497.813.000	3.287.009.200	93,97	533.470.700	487.009.200	91,29	2.964.342.300	2.800.000.000	94,46	90%	94%
27	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.497.813.000	3.287.009.200	93,97	533.470.700	487.009.200	91,29	2.964.342.300	2.800.000.000	94,46	90%	94%
28	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	3.222.813.000	3.017.212.600	93,62	258.470.700	217.212.600	84,04	2.964.342.300	2.800.000.000	94,46	1 Aplikasi	1 Aplikasi
29	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	275.000.000	269.796.600	98,11	275.000.000	269.796.600	98,11	-	-	0,00	10 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah dan 6 Tititk Wifi Publik
29	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	10.444.000	6.051.000	57,94	10.444.000	6.051.000	57,94	-	-	0,00	90%	90%
30	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	10.444.000	6.051.000	57,94	10.444.000	6.051.000	57,94	-	-	0,00	90%	90%
33	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	10.444.000	6.051.000	57,94	10.444.000	6.051.000	57,94	-	-	0,00	1 Dokumen	1 Dokumen

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN									CAPAIAN KINERJA	
		TOTAL			BELANJA OPERASI			BELANJA MODAL				
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	RENC.	REAL
		Rp.	Rp.		Rp.	Rp.		Rp.	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	18	19
34	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	13.528.000	13.284.000	98,20	13.528.000	13.284.000	98,20	-	-	0,00	90%	98%
35	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	13.528.000	13.284.000	98,20	13.528.000	13.284.000	98,20	-	-	0,00	90%	98%
36	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	13.528.000	13.284.000	98,20	13.528.000	13.284.000	98,20	-	-	0,00	1 Laporan	1 Laporan
Jumlah Belanja Operasi		7.485.740.296	6.439.173.360	86,02								
Jumlah Belanja Modal		2.964.342.300	2.800.000.000	94,46								
Jumlah		10.450.082.596	9.239.173.360	88,41								

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa, penyerapan anggaran tertinggi yaitu pada Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi sebesar 98,20%, sedangkan untuk penyerapan anggaran terendah yaitu pada Program penyelenggaraan statistik sektoral sebesar 57,59%.

Jika dilihat dari kegiatan yang penyerapan anggarannya tertinggi yaitu pada Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar 98,20%. Sedangkan untuk kegiatan yang penyerapan anggaran terendah yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota sebesar 57,59%.

Lebih rinci lagi dilihat dari Sub Kegiatan untuk penyerapan anggaran yang tertinggi yaitu Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD realisasi anggaran 100%, sedangkan untuk Sub Kegiatan yang realisasi anggarannya terendah yaitu Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral sebesar 57,94%.

3.2.2. Faktor Penghambat Realisasi Anggaran

Pengukuran capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dilakukan dengan menggunakan pendekatan terhadap pengukuran capaian realisasi anggaran. Hal ini dilakukan karena faktor penyebab utama tidak teralisasinya kegiatan adalah tidak terealisasinya sebagian anggaran meskipun faktor lain juga dapat mempengaruhi atau menghambat tidak teralisasinya kegiatan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa ternyata anggaran sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan. Permasalahan realisasi anggaran yang terjadi pada tahun 2025 dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

1. Adanya efisiensi anggaran, sehingga perlu dilakukannya penyesuaian anggaran dan penyesuaian output kegiatan;
2. Pengajuan pencairan anggaran yang terhambat, pada pelaksanaan proses pengajuan pencairan anggaran mengalami beberapa kendala seperti tidak sesuai jadwal anggaran kas yang sudah disusun dengan pelaksanaannya, kurang SDM yang membidangi dan koordinasi yang masih belum optimal antar Bendahara, PPKD, PPTK, KPA dan PA;
3. Proses persetujuan yang membutuhkan waktu relatif lama, dokumen pencairan anggaran yang telah di buat mengalami keterlambatan dalam proses persetujuan baik itu secara internal OPD ataupun persetujuan di eksternal OPD;
4. Adanya penyesuaian program prioritas OPD;
5. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), Kurangnya kuantitas, kapasitas dan kualitas SDM teknis dalam pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa, yang menghambat keberlanjutan program;
6. Anggaran Tenaga Outsourcing belum seluruhnya terpakai karna masih ada tenaga outsourcing yang belum terekrut;
7. Tidak adanya pelaksanaan Lampung fair sehingga anggarannya tidak terserap;
8. Belanja hibah yang belum seluruhnya tersalurkan;
9. Tidak melaksanakan Kerjasama langganan koran pada tahun 2025.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2025 telah dapat dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang disusun sebagai wujud berkembangnya semangat akuntabilitas serta dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini adalah sebagai alat umpan balik (*feedback*) yang dapat digunakan manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang memiliki Sasaran Strategis yang ditetapkan pada RPJMD. Sasaran Strategis mencakup seluruh Program/ Kegiatan yang telah disusun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 dan seluruh kegiatan terlaksana, dalam pelaksanaan seluruh program/kegiatan pada tahun anggaran 2025 dapat disimpulkan bahwa berjalan dengan baik

dengan total serapan anggaran sebesar Rp. 9.239.173.360,- (Sembilan Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah) atau mencapai 84,41% dari pagu anggaran.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2025 realisasi yang dicapai dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pencapaian target indikator kinerja Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang ini memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam Penerapan Teknologi Informasi di Kabupaten Tulang Bawang sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen baik dari aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

4.2 Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan hal tersebut, dalam Penerapan Teknologi Informasi di Kabupaten Tulang Bawang pasti muncul suatu permasalahan yang berkembang dan merupakan tantangan bagi Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang dengan upaya untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang dengan upaya sebagai berikut :

1. Memperkuat koordinasi pelaksanaan tugas di bidang Teknologi Informasi yang diemban oleh Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang dengan memperkuat peran kelembagaan Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang sehingga dapat lebih efektif dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Tulang Bawang sebagai bentuk memenuhi tuntutan tantangan di masa mendatang, melalui:
 - a. Peningkatan dan Pengembangan kualitas sumber daya aparatur;

- b. Kemudahan bagi aparaturnya pemerintah untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan;
 - c. Penerapan “*reward dan punishment*” secara proporsional;
 - d. Peningkatan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan;
 - e. Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta penyebaran informasi mengenai potensi dan program pembangunan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Inovasi dalam hal basis data yang lebih efektif melalui adanya Pembangunan dan Pengembangan Portal/E-Data yang mana semua data yang sebelumnya tersebar pada setiap OPD menjadi terangkum dalam Portal Data/E-Data;
3. Dengan adanya portal data, maka dibangun Jaringan Server dan Internet guna memenuhi kebutuhan Integrasi Data, agar terjangkauunya seluruh OPD dengan jaringan Internet melalui server tersebut.

Sangat disadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2025 ini belum sempurna. Sehubungan dengan itu masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan LKjIP ini sangat diharapkan sehingga untuk tahun selanjutnya akan menjadi lebih baik. Terima kasih.

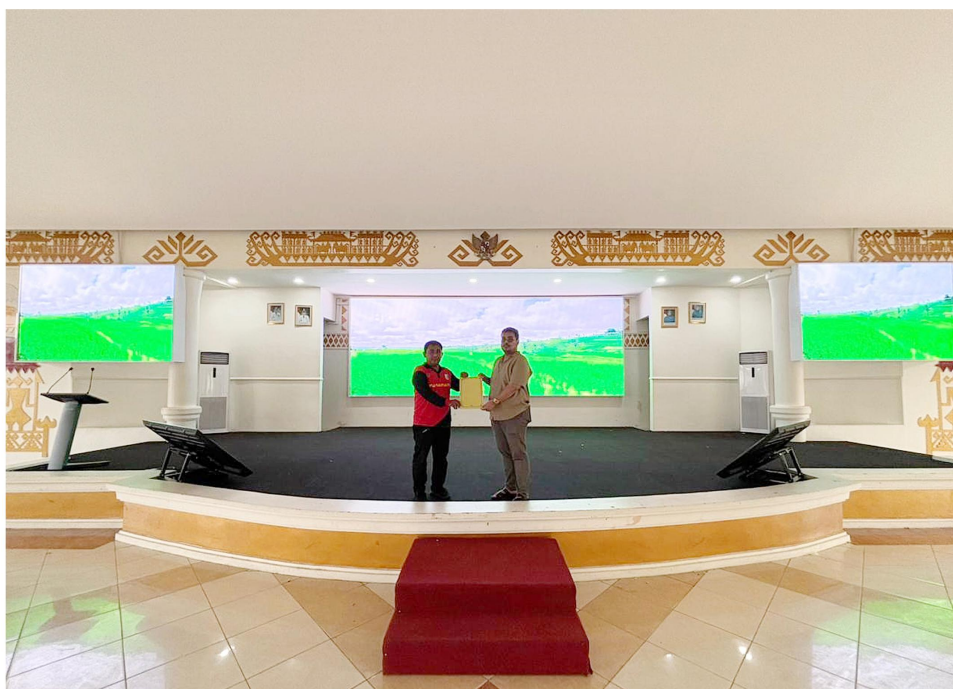
LAMPIRAN

Lampiran Urusan Program Informasi dan Komunikasi Publik





Lampiran Urusan Program Aplikasi Informatika

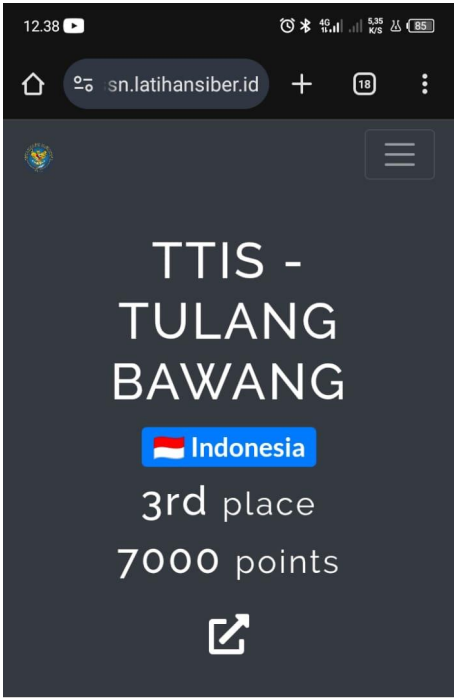








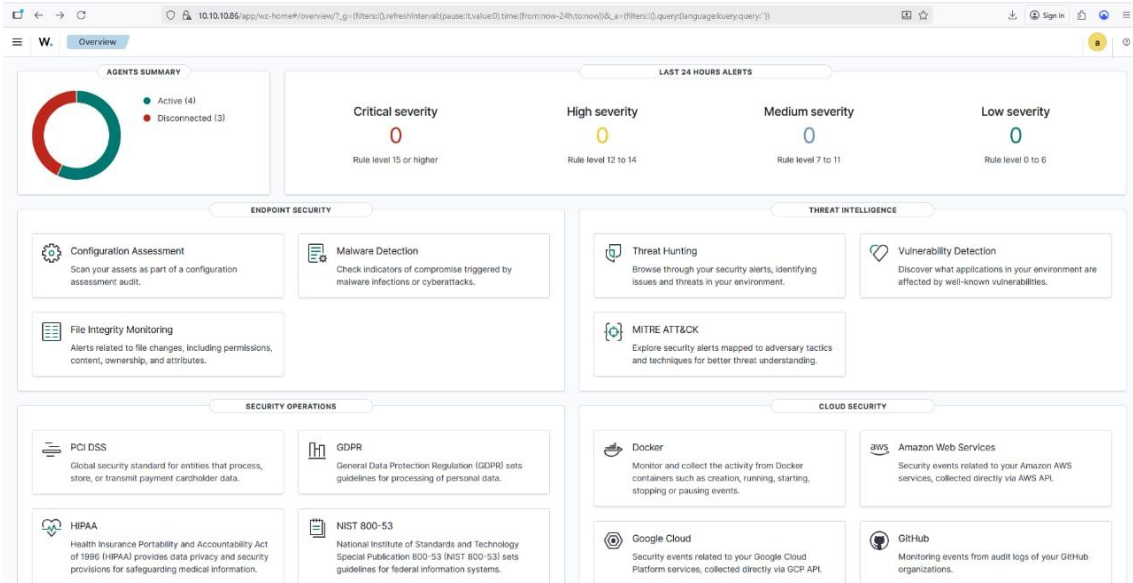
Lampiran Urusan Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

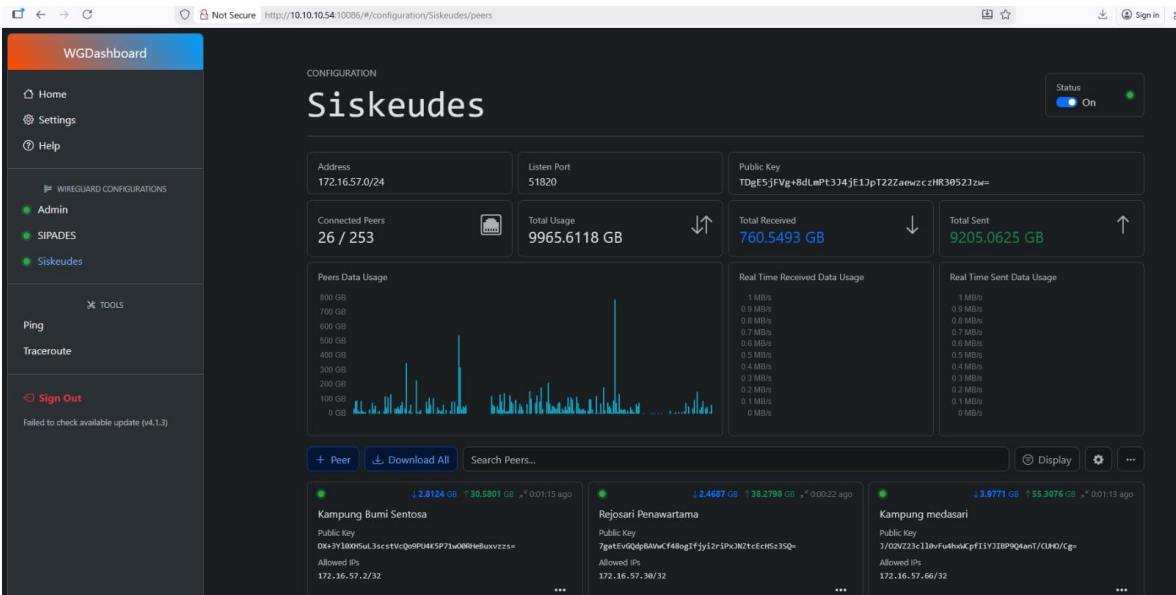
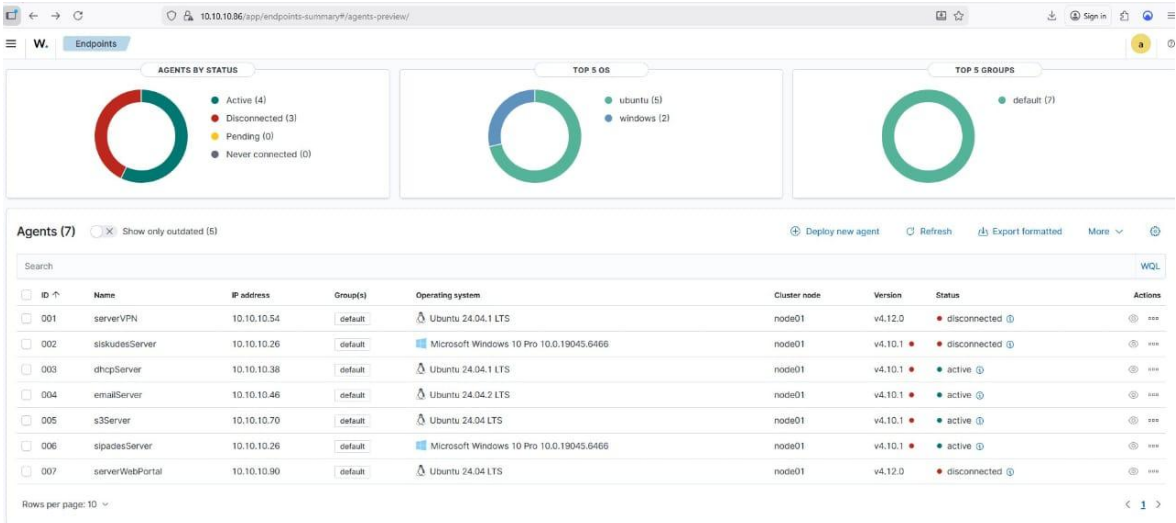


Awards

Solves

Challenge Value Time





Lampiran Urusan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Portal Data | Portal Data Tulang | x +

Not secure | portaldata.tulangbawangkab.go.id

Gmail YouTube Maps

To get future Google Chrome updates, you'll need Windows 10 or later. This computer is using Windows 7. [Learn more](#)

PORTAL DATA TULANG BAWANG

DATA SET DATASET INFO TENTANG KONTAK MELLOH

TULANG BAWANG
Temukan data Pemerintah dengan mudah!

Featured Data

- Gambaran Umum Tulang Bawang
- Infografis Tulang Bawang
- OPD Tulang Bawang
- Data Makro Tulang Bawang
- Penghargaan Tulang Bawang
- Potensi Daerah Tulang Bawang
- Kependudukan Tulang Bawang
- Kesehatan Tulang Bawang
- Sosial Tulang Bawang

Portal Data Tulang Bawang - Wei | x +

Not secure | portaldata.tulangbawangkab.go.id/admin#

Gmail YouTube Maps

Update

Dashboard Admin

Active Administrator

BACK

hi Administrator ! sistem mendeteksi progress input data Administrator BAPPEDA 25 % complete dari 8 tabel.

Administrator Bandar Lampung, Lampung

My account

Dashboard Home

Dashboard E-Data

GAMBARAN UMUM

Luas Wilayah

VISIT E-DATA

DASHBOARD E-DATA

URUSAN DINAS DAERAH

DINAS PENDIDIKAN

DINAS SOSIAL

DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG

© 2020. Andrastuff V.4.0 member of Microdata Indonesia

